



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020



NOMOR : LKJ-02/PW31/6/2021

TANGGAL : 11 Januari 2021

KATA PENGANTAR



Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berperan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Pembangunan Nasional.

Sebagai implementasi atas amanah tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) sasaran startegis yaitu 1)Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah, 2)Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional, 3)Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha, 4)Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi, 5)Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas

Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU dan 6)Meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas.

Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Rencana Strategis 2020 – 2024 serta Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban atas capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tersebut. Laporan ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2020, analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, serta pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, 11 Januari 2021
Kepala Perwakilan,

Raden Muhyantara
NIP. 19710114 199103 1 001



Ringkasan Eksekutif

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP memasuki babak baru dimana ditegaskan bahwa peran BPKP adalah sebagai auditor Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas untuk melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh Instansi Pemerintah, serta pengembangan alat kendali Presiden dan Wakil Presiden. Dengan babak baru tersebut BPKP telah membenahi diri dengan mengadakan reposisi dan revitalisasi yang diawali dengan merumuskan visi, misi, dan strategi yang baru dan dilanjutkan dengan penyesuaian program dan kegiatan.

Dengan paradigma baru ini, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berusaha memberikan perbaikan dan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan membantu pemerintah di wilayah Provinsi Gorontalo untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian jasa *assurance* dan *consulting*.

Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP disampaikan dalam LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai

evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja BPKP dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2020, juga mencerminkan sejauh mana SAKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, capaian kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan beserta sumber daya pendukung yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian 30 (tiga puluh) IKU yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, masih terdapat 2 (dua) IKU yang belum tercapai yaitu Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat dan Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3;
2. Capaian sasaran kegiatan/output yang ditargetkan adalah 143 laporan pengawasan yang terdiri dari 52 laporan dari bidang IPP, 50 laporan dari bidang APD, 14 laporan dari bidang AN, 12 laporan dari bidang Investigasi, dan 15 laporan dari bidang P3A. Realisasi laporan yang terbit adalah sebanyak 171 laporan pengawasan, sudah termasuk PKPT tambahan, sehingga capaiannya sebesar 119,58%;
3. Penyerapan dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp19.083.459.622,00 atau 98,66% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp19.343.148.000,00;
4. Realisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 18.477 Orang Hari (OH) atau mencapai 89,61 % dari potensi OH sebanyak 20.619 OH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan.....	1
B. Struktur Organisasi Unit Kerja	3
C. Aspek Strategis Organisasi	8
D. Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	12
A. Rencana Strategis 2020 – 2024	12
1. Pernyataan Visi.....	12
2. Pernyataan Misi	14
3. Tujuan Strategis.....	17
4. Indikator Kinerja Utama.....	18
5. Sasaran Program.....	20
6. Program dan Kegiatan	23
B. Perjanjian Kinerja 2020	27
1. Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2020	27
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32

A. Capaian Kinerja Organisasi.....	32
1. Ringkasan Kinerja.....	32
2. Uraian Kinerja	35
B. Kinerja Lainnya Tahun 2020	88
1. Kinerja Lainnya	88
2. Penghargaan	88
3. Perbaikan SAKIP Tahun 2020	88
C. Akuntabilitas Keuangan.....	89
BAB IV PENUTUP	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	3
Gambar 1.2 Sistematika Penyajian LKj	10
Gambar 2.1 Penyusunan Target Output Perwakilan	28
Gambar 3.1 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi.....	37
Gambar 3.2 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi.....	38
Gambar 3.3 Capaian Indikator Kinerja Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah.....	40
Gambar 3.4 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah KP yang diawasi	43
Gambar 3.5 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah KP Yang Tercapai Sesuai Target	45
Gambar 3.6 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	47
Gambar 3.7 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi.....	51
Gambar 3.8 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi	53
Gambar 3.9 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase BUMDes yang mampu Menyusun laporan keuangan	55
Gambar 3.10 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan	58
Gambar 3.11 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan	60

Gambar 3.12 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	64
Gambar 3.13 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3.....	66
Gambar 3.14 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3.....	68
Gambar 3.15 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	70
Gambar 3.16 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Tersedianya rekomendasi strategis prov/kab/kota	72
Gambar 3.17 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa.....	74
Gambar 3.18 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes.....	76
Gambar 3.19 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	78
Gambar 3.20 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	79
Gambar 3.21 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	79
Gambar 3.22 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu	80
Gambar 3.23 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Skor IKPA Unit Kerja	81
Gambar 3.24 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase SPM yang terbit tepat waktu	82
Gambar 3.25 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	11
Gambar 3.26 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	84

Gambar 3.27 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Unit Kerja	85
Gambar 3.28 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Maturitas SPIP Unit Kerja	86
Gambar 3.29 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	87
Gambar 3.30 Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	88

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Tabel SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berdasarkan Pangkat Golongan.....	6
Tabel 1.2 Tabel SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berdasarkan Struktur Jabatan.....	6
Tabel 1.3 Tabel SDM berdasarkan Komposisi Auditor	7
Tabel 1.4 Tabel SDM berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	7
Tabel 1.5 Tabel SDM berdasarkan Usia	7
Tabel 2.1 Target Kinerja Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2020.....	21
Tabel 2.2 Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output).....	24
Tabel 2.3 Tabel Target Output per Bidang	28
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	30
Tabel 3.1 Ringkasan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun	32
Tabel 3.2 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Strategis Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	35
Tabel 3.3 Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi.....	36
Tabel 3.4 Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi.....	38
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	40
Tabel 3.6 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Strategis Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional.....	41
Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Jumlah KP yang diawasi.....	43
Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Jumlah KP yang tercapai sesuai target.....	44

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan.....	46
Tabel 3.10 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Strategis Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	48
Tabel 3.11 Hasil Evaluasi Kinerja PDAM	49
Tabel 3.12 Permasalahan kinerja PDAM	49
Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi.....	50
Tabel 3.14 Hasil Evaluasi Kinerja BLUD	52
Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi	52
Tabel 3.16 BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan.....	54
Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan.....	55
Tabel 3.18 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Program Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	56
Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan.....	58
Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan.....	60
Tabel 3.21 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	61
Tabel 3.22 Capaian Level Kapabilitas APIP s.d. 31 Desember 2020	63
Tabel 3.23 Capaian Indikator Kinerja Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3.....	63
Tabel 3.24 Capaian Level Maturitas SPIP s.d. 31 Desember 2020	65
Tabel 3.25 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 Tahun 2019 dan 2020.....	65

Tabel 3.26 Penilaian Baseline MRI s.d. 31 Desember 2020.....	67
Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3 Tahun 2019 dan 2020	67
Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Tahun 2019 dan 2020	69
Tabel 3.29 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tersedianya rekomendasi strategis prov/kab/kota Tahun 2019 dan 2020	71
Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa Tahun 2019 dan 2020	73
Tabel 3.31 Implementasi Siswaskeudes di Provinsi Gorontalo s.d. 31 Desember 2020	15
Tabel 3.32 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes Tahun 2019 dan 2020	15
Tabel 3.33 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan.....	77
Tabel 3.34 Perhitungan Penilaian IKPA	81
Tabel 3.35 Perbaikan Nilai Implementasi SAKIP tahun 2020.....	89
Tabel 3.36 Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2020 menurut Jenis Belanja.....	89
Tabel 3.37 Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2020 menurut Program/Kegiatan	90
Tabel 3.38 Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2020 menurut Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	91
Tabel 4.1 Capaian Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2020.....	92

Daftar Lampiran

Lampiran I Kinerja Sasaran Program dan Penggunaan Dana/SDM (OH) Tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.....	101
Lampiran II Perbandingan Realisasi dan Capaian Outcome Tahun 2020 dengan Tahun 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	103
Lampiran III Capaian Kinerja Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Dana/OH (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2020	106
Lampiran IV Perbandingan Realisasi dan Capaian Kegiatan Tahun 2020 dengan Tahun 2019 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	107
Lampiran V Maturitas SPIP Pemda Tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	108
Lampiran VI Kapabilitas APIP Pemda Tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.....	109
Lampiran VII Tingkat Kesehatan BUMD Tahun 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan intern pemerintah dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yaitu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

BPKP memiliki 34 perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang merupakan perwakilan dengan klasifikasi Tipe B setingkat eselon II berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/306/M.PAN-RB/2/2013 tentang Peningkatan Eselon 8 (delapan) Perwakilan BPKP serta Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

1. Kedudukan

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo adalah Instansi Vertikal BPKP di daerah Gorontalo yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

2. Tugas Pokok

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Selain itu, berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014, Perwakilan BPKP mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
- c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
- d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
- e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
- c. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;
- d. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
- e. Pengawasan terhadap kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
- f. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- g. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
- h. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/ BUMD;
- i. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta

- kontraktor bagi hasil dan kontrak kerjasama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan, dan
 - m. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

B. Struktur Organisasi Unit Kerja

1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo termasuk dalam perwakilan BPKP tipe B. Bagan Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo terdiri dari:



Sedangkan, susunan Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo meliputi:

- a. Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum Kepegawaian;
- b. Koordinator Pengawasan Bidang Intansi Pemerintah Pusat (IPP);
- c. Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD);
- d. Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara (AN);
- e. Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi;
- f. Koordinator Pengawasan Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A).

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bagian/bidang adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dengan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan dan rumahtangga;
 - 2) Pengelolaan perpustakaan.
- b. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengelola kegiatan pengawasan serta mengendalikan mutu hasil pengawasan pada Instansi Pemerintah Pusat di daerah dan Pemda yang sumber dananya berasal dari APBN, Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Pinjaman Hibah Luar Negeri.
- c. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan intansi pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan evaluasi hasil pengawasan.

- d. Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil dan kontrak kerjasama, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan.
 - e. Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
 - f. Bidang P3A mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengelola, melaksanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan bahan laporan realisasi kegiatan, penyusunan laporan berkala atas hasil-hasil pengawasan serta program pembinaan APIP (termasuk pembinaan jabatan fungsional auditor/JFA di lingkungan Perwakilan dan APIP Daerah).
- Selain struktur organisasi tersebut di atas, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yaitu Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis dan Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

2. Sumber Daya Manusia

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo didukung dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) sebanyak 88 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pangkat Golongan

Berdasarkan Pangkat Golongan, SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda	IV c	4
2.	Pembina Tingkat I	IV b	2
3.	Pembina	IV a	4
4.	Penata Tingkat I	III d	16
5.	Penata	III c	4
6.	Penata Muda Tingkat I	III b	17
7.	Penata Muda	III a	19
8.	Pengatur	II c	22
Jumlah			88

b. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Jabatan, SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tabel SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berdasarkan Struktur Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Struktural	4
2.	Kordinator Pengawasan	6
3.	Fungsional Auditor	69
4.	Fungsional Tertentu	2
5.	Fungsional Umum	7
Jumlah		88

Berdasarkan komposisi Auditor:

Tabel 1.3
Tabel SDM berdasarkan Komposisi Auditor

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Auditor Madya	6
2.	Auditor Muda	9
3.	Auditor Pertama	32
4.	Auditor Penyelia	6
5.	Auditor Pelaksana	16
Jumlah		69

- c. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan, SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Tabel SDM berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Strata Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	5
2.	S1/D4	54
3.	D3	27
4.	SLTA	2
Jumlah		88

- d. Berdasarkan Usia
Berdasarkan Usia, SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.5
Tabel SDM berdasarkan Usia

No	Kelompok Usia (tahun)	Jumlah (orang)
1.	55<	4
2.	51-55	9
3.	41-50	15
4.	31-40	15
5.	<=30	45
Jumlah		88

C. Aspek Strategis Organisasi

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan Lembaga Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas BPKP sejalan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, sebagai bagian integral dari BPKP sepenuhnya mendukung BPKP dalam menjalankan peran strategisnya yaitu sebagai **“Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Sesuai Renstra BPKP Tahun 2020-2024, kegiatan yang menjadi tanggungjawab Perwakilan adalah Kegiatan Pengawasan Pembangunan, dengan 6 (enam) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah;
2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional;

3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha;
4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi;
5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU;
6. Meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas.

Selain itu, isu-isu strategis di wilayah Provinsi Gorontalo, antara lain:

1. Penyelesaian Proyek Bendungan Bulango Ulu;
2. Integrasi data bantuan sosial pusat dan daerah;
3. Ketepatan sasaran dan jumlah penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Program Bantuan Iuran PBP/PU BPJS;
4. Peningkatan implementasi SPIP dan manajemen risiko secara terstruktur mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi atas hasil penerapannya;
5. Percepatan dan penyaluran penggunaan dana desa yang digunakan untuk percepatan penanganan pandemi Covid 19, pemulihan stabilitas ekonomi nasional/daerah/desa dan pengawasannya oleh APIP;
6. Tata kelola BUMDes, GCG PDAM dan bentuk badan hukum BUMD belum sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan belum sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Peningkatan pencegahan korupsi melalui pengukuran Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK);
9. Penilaian dan pengawasan risiko fraud pada kegiatan penyaluran bantuan sosial dan PBJ pada masa pandemi Covid 19 yang masih rendah;
10. Aset pemda yang belum jelas status kepemilikannya seperti pada pembangunan Secaba Rindam XIII/Merdeka di Kabupaten Gorontalo dan batas wilayah antara Kabupaten Bone Bolango dan Kota

Gorontalo serta aset pemda yang masih dalam proses hukum oleh pihak ketiga;

11. Ketidaksielarasan pelaksanaan pembangunan nasional di daerah dalam hal tujuan, sasaran program/kegiatan di RKPD.

Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses bisnis pengawasan keuangan dan pembangunan selalu dilakukan reuiu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di negara-negara lain (*best practices benchmarking*) melalui studi literatur maupun studi ke organisasi internal audit yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya melalui kegiatan dan layanan produk antara lain:

1. Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa *assurance* dan *consulting* diarahkan menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan (*Service and Role of Internal Audit Element*);
2. Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim (*People Management Element*);
3. Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategis pengawasan berfokus pada kebutuhan *shareholder* dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktik-praktik terbaik pengawasan (*Professional Practices Element*);
4. Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun individu, melalui SIMHP dan SIMA untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan (*Performance Management and Accountability Element*);
5. Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasil pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan Kementerian, Lembaga,

Pemerintah Daerah dan Korporasi dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja (*Organizational Relationship and Culture Element*);

6. Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP melakukan pengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dalam mitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan mendorong tercapainya tujuan organisasi (*Governance Structure Element*).

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai.

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKJ) ini menginformasikan pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo selama periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020. Penyajian LKJ 2020 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut:

Gambar 1.2
Sistematika Penyajian LKj



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada, atau yang mungkin timbul. Rencana strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Merujuk pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024, BPKP melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP secara nasional, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah menetapkan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Periode 2020-2024 pada 2 September 2020 sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor LSTRA-124/PW31/6/2020 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024. Renstra tersebut mengacu pada Renstra BPKP Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2020.

1. Pernyataan Visi

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:

“ Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.

Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2020 atau setelahnya, visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai penjabaran Visi BPKP yaitu “Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

2. Pernyataan Misi

Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, dirumuskan misi-misi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

- 1 •Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional
- 2 •Membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas

Penetapan misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi Kesatu, yaitu: “Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional BPKP mengemban amanah untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional”

Misi ini mengandung tiga kata kunci, yaitu pengawasan intern, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional

a. Pengawasan Intern

BPKP melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, kegiatan lain berdasarkan penugasan oleh Presiden, dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern.

b. Akuntabilitas

Tiga hal yang terkait dalam akuntabilitas adalah pihak yang berakuntabilitas (*accountor*), pihak yang diberi akuntabilitas atau dilapori (*accountee*) dan objek yang atasnya dilaporkan akuntabilitasnya. Secara organisasional, dalam kurun 2020-2024 BPKP adalah bagian dari kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Hubungan akuntabilitas internal kabinet menempatkan Presiden sebagai *accountee* atau pihak yang diberi akuntabilitas atau dilapori. Seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, sebagai pihak yang mendapat amanah berupa kewenangan dan anggaran belanja dan atau anggaran pendapatan menjadi pihak yang berakuntabilitas (*accountor*). Adapun objek akuntabilitasnya adalah seluruh kegiatan pengelolaan kewenangan dan anggaran yang diberikan. Jadi, ini termasuk akuntabilitasnya atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan kegiatan substantif pembangunan sesuai dengan yurisdiksi kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian.

BPKP disamping harus berakuntabilitas sebagai dirinya sendiri, dalam fungsinya sebagai pengawas intern adalah mata dan telinga Presiden yang sekaligus menjadi mediator informasi dari *accountor* ke *accountee*. Fungsi *assurance* yang dijalankan oleh BPKP adalah terutama untuk memberi jaminan memadai akan kewajaran informasi akuntabilitasnya yang diberikan oleh *accountor* kepada *accountee*. Untuk meningkatkan sistem akuntabilitas ini, BPKP dapat menjalankan fungsi *consultancy*.

c. Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan

nasional. Ruang lingkup pengawasan meliputi akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang diseluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.

Misi Kedua, yaitu: “Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas”

Misi kedua merupakan *enablers* BPKP, yaitu kemampuan, energi, dan sumber daya yang dimiliki BPKP yang berkontribusi terhadap suksesnya BPKP dalam merealisasikan visinya. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas merujuk pada enam pilar yang harus dibangun, yaitu:

a. Integritas dan Kultur

Menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan SDM untuk berkinerja secara optimal sesuai dengan kemampuannya dengan mengupayakan keseimbangan antara prestasi dan *reward*.

b. Kinerja dan Kesejahteraan

Menciptakan dan mengembangkan metode kerja dan inovasi secara berkelanjutan yang memungkinkan BPKP untuk melaksanakan tupoksinya dengan efektif dan efisien serta dengan memperhatikan keahlian (*proficiency*) dan kecermatan profesional (*due professional care*).

c. Metode Kerja dan Inovasi

Membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan dengan *stakeholders* dan atau para pihak yang terkait, termasuk kolaborasi pengawasan dengan para APIP, BPK dan pihak lain dalam sistem pengawasan nasional.

d. Sumber Daya Fisik dan Keuangan

Menyediakan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai yang memungkinkan BPKP untuk melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan standar profesional, dan agar dapat berkinerja secara efektif dan independen.

e. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Membangun teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan BPKP dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan seluruh proses bisnisnya secara efektif dan efisien.

f. Hubungan Publik dan Kolaborasi

Membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan dengan *stakeholders* dan atau para pihak yang terkait, termasuk kolaborasi pengawasan dengan para APIP, BPK dan pihak lain dalam sistem pengawasan nasional.

3. Tujuan Strategis

Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

Tujuan akan menjadi arah perjalanan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dan perbaikan-perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

Pembentukan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo bertujuan agar pelaksanaan tugas pengawasan yang diamanahkan kepada BPKP dapat berjalan lebih efisien dan efektif guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta lebih meningkatkan pelayanan kebutuhan para pemangku kepentingan akan penguatan akuntabilitas laporan keuangan dan implementasi SPIP di wilayah Provinsi Gorontalo.

Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

- a. Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional

b. Membangun sumber daya pengawasn yang berkualitas

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKP merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

IKU BPKP merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKP. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat *outward looking* yaitu perspektif manfaat langsung bagi *stakeholders* eksternal yang menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua bersifat *inward looking* yang menunjukkan manfaat bagi *stakeholders* internal BPKP. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. IKU digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output)

Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo untuk tahun 2020-2024 sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor LSTRA-124/PW31/6/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi,
- 2) Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi,
- 3) Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah,
- 4) Nilai penyelamatan keuangan negara,
- 5) Nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer
- 6) Nilai penyelamatan pengelolaan pembiayaan daerah
- 7) Jumlah KP yang diawasi,

- 8) Jumlah KP yang tercapai sesuai target,
- 9) Jumlah Program Lintas Sektor pembangunan daerah yang tercapai sesuai target,
- 10) Persentase desa yang diaudit kinerja dengan hasil Baik,
- 11) Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan,
- 12) Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik,
- 13) Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat,
- 14) Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat,
- 15) Jumlah Bumdes mampu menyusun LK,
- 16) Presentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan,
- 17) Presentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan,
- 18) Jumlah pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi (EPK) baik,
- 19) Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi (EPK) baik,
- 20) Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq level 3,
- 21) Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq level 3,
- 22) Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq level 3,
- 23) Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq level 3,
- 24) Persentase jumlah pemda yg akuntabel pengelolaan keuangan dan kinerja,
- 25) Tersedianya rekomendasi strategis kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota,
- 26) Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa,
- 27) Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa dengan memadai,
- 28) Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes,
- 29) Persentase BUMD dengan MRI \geq level 3,
- 30) Persentase BLUD dengan MRI \geq level 3,

- 31) Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq level 3,
- 32) Jumlah BLUD dengan kapabilitas SPI \geq level 3,
- 33) Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja,
- 34) Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi,
- 35) Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu,
- 36) Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja.
- 37) Skor IKPA unit kerja,
- 38) Persentase SPM yang terbit tepat waktu,
- 39) Persentase penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP,
- 40) Nilai pengelolaan BMN unit kerja,
- 41) Nilai SAKIP unit kerja,
- 42) Maturitas SPIP unit kerja,
- 43) Indeks MR unit kerja,
- 44) Indeks kualitas layanan ketatausahaan unit kerja,
- 45) Indeks kepuasan layanan unit kerja.

5. Sasaran Program

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh BPKP untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra BPKP berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan.

Tabel 2.1
Target Kinerja Sasaran Program Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tahun 2020

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja <i>Outcome</i>	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	116
		Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	231
		Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	0
		Nilai penyelamatan keuangan negara	Rupiah (Juta)	27.124
		Nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer	Rupiah (Juta)	0
		Nilai penyelamatan pengelolaan pembiayaan daerah	Rupiah (Juta)	0
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah KP yang diawasi	Buah	7
		Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Buah	7
		Jumlah Program Lintas Sektoral pembangunan daerah yang tercapai sesuai target	Buah	0
		Persentase desa yang diaudit kinerja dengan hasil Baik	%	0
		Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan,	%	75
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	Unit	0
		Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat	Unit	2
		Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat	Unit	1
		Jumlah BUMDes yang mampu menyusun LK	Unit	14
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	%	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja <i>Outcome</i>	Satuan	Target
Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	70
	Jumlah pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi (EPK) baik	Unit	0
	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi (EPK) baik	Unit	0
5 Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq level 3	APIP	7
	Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq level 3	Pemda	7
	Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq level 3	Pemda	0
	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq level 3	Pemda	1
	Persentase jumlah pemda yg akuntabel pengelolaan keuangan dan kinerja	%	0,18
	Tersedianya rekomendasi strategis kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota	Rekomendasi	1
	Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa	%	40,03
	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa dengan memadai	Unit	0
	Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes	Unit	1
	Persentase BUMD dengan MRI \geq level 3	%	0
	Persentase BLUD dengan MRI \geq level 3	%	0
	Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq level 3	Unit	0
	Jumlah BLUD dengan kapabilitas SPI \geq level 3	Unit	0
6 Meningkatkan Kualitas Layanan	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	75

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja <i>Outcome</i>	Satuan	Target
"Ketatausahaan" Unit Kerja	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	100
	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100
	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100
	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor	86
	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	%	90
	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	%	100
	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor	Baik
	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	80
	Maturitas SPIP Unit Kerja	Skor	Level 3
	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Skor	70
	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	%	100
	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Skor	70

6. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk menjalankan misi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang targetnya ditetapkan setiap tahun selama kurun waktu periode renstra yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) dan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan visi organisasi, dan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun.

Sasaran program pengawasan BPKP diharapkan dapat dicapai terlaksananya kegiatan-kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional; pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut terlihat seperti pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2020
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	115,63
		Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	231,27
		Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	-
		Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	27.124,44
		Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rupiah (Juta)	-
		Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rupiah (Juta)	-
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas	Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	0
		Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	Program Prioritas	7

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2020
	Pembangunan Nasional	Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	7
		Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	Proyek Strategis Nasional	-
		Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target	Program	-
		Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	%	-
		Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	%	75
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	-
		Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	-
		Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	2
		Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BUMD	1
		Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	14
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang memanfaatkan/ditindaklanjuti	%	100
		Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	70,00
		Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	-
		Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Badan Usaha	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2020
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	K/L/Pemda	7
		Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	K/L/Pemda	7
		Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Pemda	-
		Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	PemKab / Kota	1
		Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	0,18
		Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Rekomendasi	1
		Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Desa	40,03
		Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	-
		Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1
		Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	-
		Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	-
		Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BULD	-
		Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	BUMD	-
		Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	BLUD	-
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2020
	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	100
	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100
	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100
	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	86
	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	%	90
	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	%	100
	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	Baik
	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	80
	Nilai Reputasi Unit Kerja	Indeks Skala 100	-
	Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 1-5	Level 3
	Indeks MR Unit Kerja	Level 1-5	-
	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	70
	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	Indeks Skala 100	70

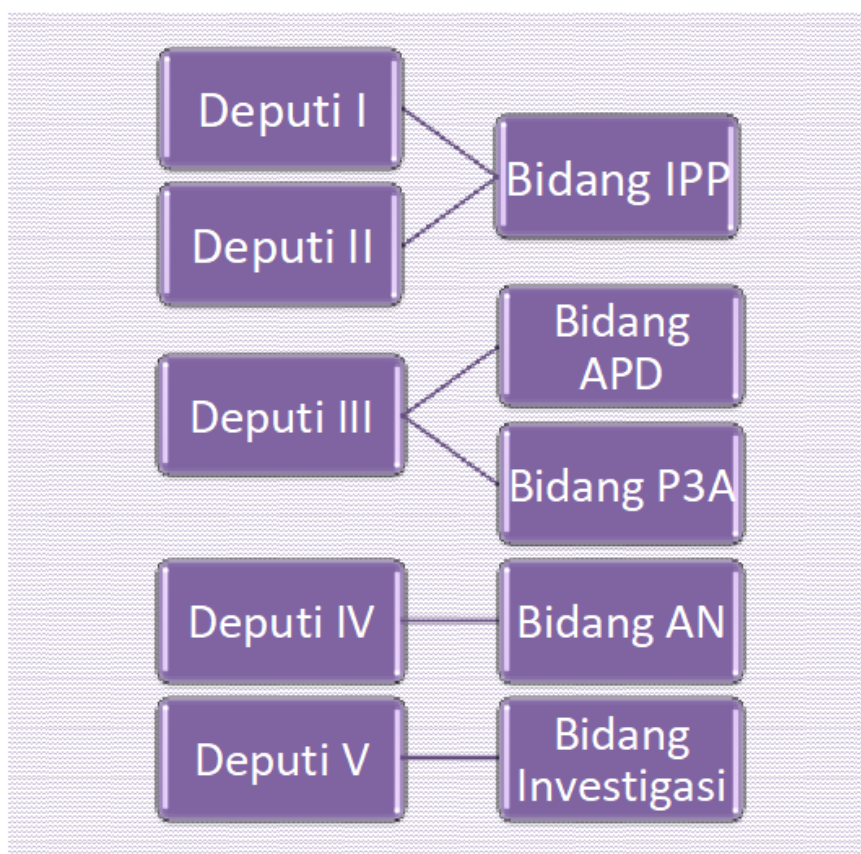
Berdasarkan Bidang Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, target output pengawasan sebesar 143 Laporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tabel Target Output per Bidang

	Target Kinerja	Jumlah Laporan
Bidang	IPP	52
	APD	50
	AN	14
	INVEST	12
	P3A	15
	TOTAL	143

Target *output* di atas berdasarkan target Laporan yang sudah ditetapkan oleh rendal pada masing-masing kedeputian. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo berfungsi melakukan kegiatan pengawasan di daerah sebagai dukungan kepada rendal untuk mencapai target tersebut. Jumlah output di atas akan berubah setiap tahun yang dijalani sesuai dengan target masing-masing rendal.

Gambar 2.1 Penyusunan Target Output Perwakilan



Perubahan atas desain penghitungan *output* perwakilan ini per tahun dijelaskan dalam Renja Tahunan.

Untuk mendukung ketercapaian sasaran program pengawasan, dilakukan dengan kegiatan dukungan pengawasan.

B. Perjanjian Kinerja 2020

1. Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2020

Kegiatan Pengawasan BPKP tahun 2020 didasarkan pada kebijakan di bidang pengawasan dan pembinaan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), RPJMN, Renstra serta Renja 2020.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, kegiatan pengawasan yang mencakup tugas BPKP mencakup:

- a. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara dan atas kegiatan tertentu, yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, serta kegiatan lainnya berdasarkan penugasan presiden.
- b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP, meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, serta peningkatan kompetensi APIP.

Kebijakan pengawasan BPKP juga mengacu kepada:

- a. RPJM 2020 - 2024 serta RKP 2020;
- b. Direktif Presiden;
- c. Hasil Analisis Lingkungan Strategis;
- d. Isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah untuk kepentingan BPKP;
- e. Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2020 - 2024.

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020

Sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2020, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mendukung tercapainya dua sasaran program Deputi/Sekretariat Utama dengan delapan indikator kinerja. Untuk itu, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo bertanggung jawab untuk mencapai delapan sasaran program dan enam sasaran kegiatan dengan delapan belas indikator kinerja program dan enam indikator kinerja kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	115,63
	2 Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	231,27
	3 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	-
	4 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	27.124,44
	5 Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rupiah (Juta)	-
	6 Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rupiah (Juta)	-
2 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	1 Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	0
	2 Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	Kegiatan Prioritas	7
	3 Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	7
	4 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	Proyek Strategis Nasional	-
	5 Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang	Program	-
	6 Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	Persen	-
	7 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang	Persen	75,00
3 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	1 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	-
	2 Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	-
	3 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	2
	4 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BUMD	1
	5 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	14
4 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	1 Persentase hasil pengawasan represif yang memanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	100,00
	2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	70,00
	3 Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	-
	4 Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	Badan Usaha	-
5 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	1 Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	K/L/Pemda	7
	2 Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	K/L/Pemda	7
	3 Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Pemda	-
	4 Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	PemKab/Kota	1
	5 Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	0,18

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
		Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	
	6 Tersedianya Rekomendasi Strategis (<i>Policy Brief</i>) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Rekomendasi	-	
	7 Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Desa	40,03	
	8 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	-	
	9 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1	
	10 Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	-	
	11 Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	-	
	12 Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BULD	-	
	13 Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	BUMD	-	
	14 Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	BLUD	-	
	6 Meningkatkan Tata Kelola Unit Kerja	1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75
		2 Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Persen	100,00
		3 Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100,00
		4 Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	Persen	100,00
	5 Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	86	
	6 Persentase SPM yang terbit tepat waktu	Persen	90	
	7 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	Persen	100,00	
	8 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	Baik	
	9 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	80	
	10 Nilai Reputasi Unit Kerja	Indeks Skala 100	-	
	11 Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 1-5	Level 3	
	12 Indeks MR Unit Kerja	Level 1-5	-	
	13 Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	70	
	14 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	Indeks Skala 100	70	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA












A. CAPAIAN KINERJA Tahun 2020

1. Ringkasan Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo atas enam sasaran strategis yang dijabarkan dalam 30 (tiga puluh) indikator kinerja, menunjukkan bahwa 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja (93,33%) telah mencapai target, dan dua indikator kinerja (6,67%) belum mencapai target. Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis sebagaimana tercantum pada table 3.1

Tabel 3.1
Ringkasan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Notifikasi
Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah						
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Juta	116	221	190,52	●
1.2	Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi	Juta	231	304	131,45	●
1.4	Nilai penyelamatan keuangan negara	Juta	27.124	62.400	230,05	●
Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional						
2.1	Jumlah KP yang diawasi	Buah	7	11	157,14	●
2.2	Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Buah	7	11	157,14	●

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Notifikasi
2.5	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	%	75,00	75,00	100,00	
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha						
3.2	Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat	Unit	2	1	50,00	
3.3	Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat	Unit	1	2	200,00	
3.4	Jumlah Bumdes mampu menyusun LK	Unit	14	14	100,00	
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi						
4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan	%	100	100	100,00	
4.2	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan	%	70	70	100,00	
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						
5.1	Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Unit	7	7	100,00	
5.2	Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Unit	7	7	100,00	
5.4	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Unit	1	0	0,00	
5.5	Persentase jumlah pemda yg akuntabel pengelolaan keuangan dan kinerja	%	14,29	100	699,79	
5.6	Tersedianya rekomendasi strategis prov/kab/kota	Rekomendasi	1	1	100,00	

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Notifikasi
5.7	Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa	%	40,03	100	249,81	●
5.9	Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes	Unit	1	1	100,00	●
Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja						
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	75	82,07	109,43	●
6.2	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	100	100	100,00	●
6.3	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100,00	●
6.4	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100	100	100,00	●
6.5	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor	86	97,30	113,14	●
6.6	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	%	90	100	111,11	●
6.7	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	%	100	100	100,00	●
6.8	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor	Baik	Baik	100,00	●
6.9	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	80	84,04	105,05	●
6.10	Maturitas SPIP Unit Kerja	Skor	Level 3	Level 3	100,00	●
6.12	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Skor	70,00	78,78	112,54	●

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Notifikasi
6.13	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Skor	70	92,25	131,79	●

Keterangan: ● = mencapai/melampaui target, ● = belum mencapai target

2. Uraian Kinerja

Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah

Sasaran program Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah merupakan satu dari enam Sasaran Strategis BPKP yang dibebankan pada Perwakilan BPKP diseluruh Indonesia.

Capaian sasaran program ini diukur melalui tiga IKU dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU
Sasaran Strategis Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas
Keuangan Negara/Daerah

	IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	Juta	116	221	190,52
1.2	Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi	Juta	231	304	131,45
1.4	Nilai penyelamatan keuangan negara	Juta	27.124	62.400	230,05

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari tiga IKU yang mendukung capaian sasaran strategis “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas

Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah”, seluruh IKU yang memiliki capaian 100% atau lebih.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah” ini sebagai berikut:

1.1.

Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi

IKU “Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi” menggambarkan jumlah penerimaan daerah yang telah masuk ke kas daerah.

Kinerja indikator tersebut diukur dengan rumus :

$$\text{Realisasi IKU Persentase Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah Yang Terealisasi} = \frac{\Sigma \text{Penerimaan Negara/Daerah Tahun 2020}}{\Sigma \text{Target Penerimaan Negara/Daerah Tahun 2020}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase penerimaan negara/daerah yang terealisasi” tahun 2020 adalah sebesar Rp221.000.000,00 atau tercapai 190,52% dari target sebesar Rp116.000.000,00 dan telah melebihi target Renstra Tahun 2020.

Tingginya pencapaian ini dikarenakan wajib pajak tertib dalam pembayaran pajak daerah.

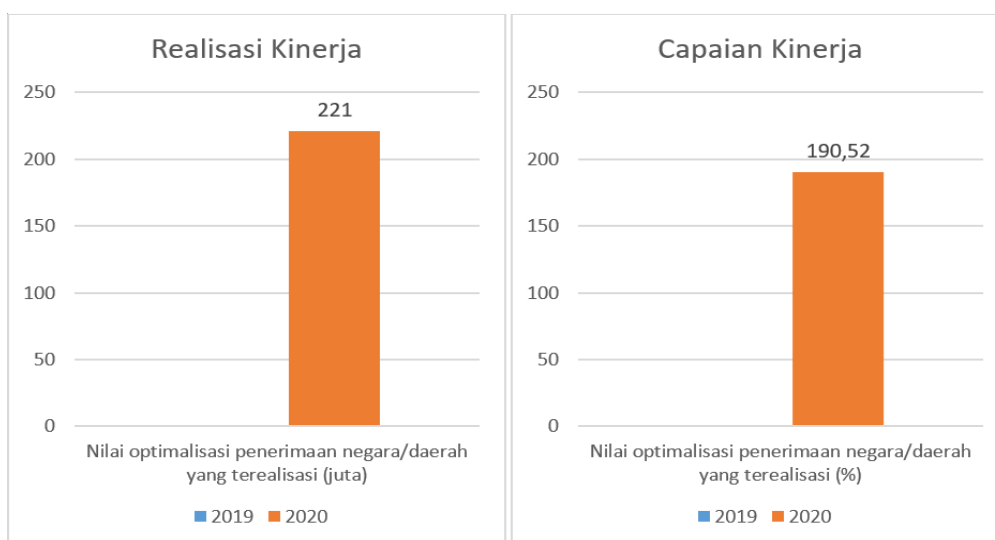
Tabel 3.3
Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah						
	Tahun 2019			Tahun 2020			Capaian Naik/ (Turun)
	Target	Realisasi	Capaian	Target (Juta)	Realisasi (Juta)	Capaian	
Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	0	0	0	116	221	190,52%	190,52%

Realisasi IKU “Persentase penerimaan negara/daerah yang terealisasi” tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2019 dikarenakan tidak terdapat realisasi tersebut di IKU tahun 2019.

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2019 dan target akhir Renstra tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan pada Gambar 3.1

Gambar 3.1
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
Persentase Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi



1.2.

Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi

IKU “Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi” menggambarkan jumlah potensi daerah yang telah optimal dalam penerimaan daerah.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi Potensi Penerimaan Negara/Daerah Yang Dioptimalisasi} = \frac{\Sigma \text{Potensi Penerimaan Negara/Daerah Yang Dioptimalisasi}}{\Sigma \text{Target Potensi Penerimaan Yang Dioptimalisasi}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi” tahun 2020 adalah sebesar Rp304.000.000,00 atau tercapai 131,45% dari target sebesar Rp231.000.000,00 dan telah melebihi target Renstra Tahun 2020.

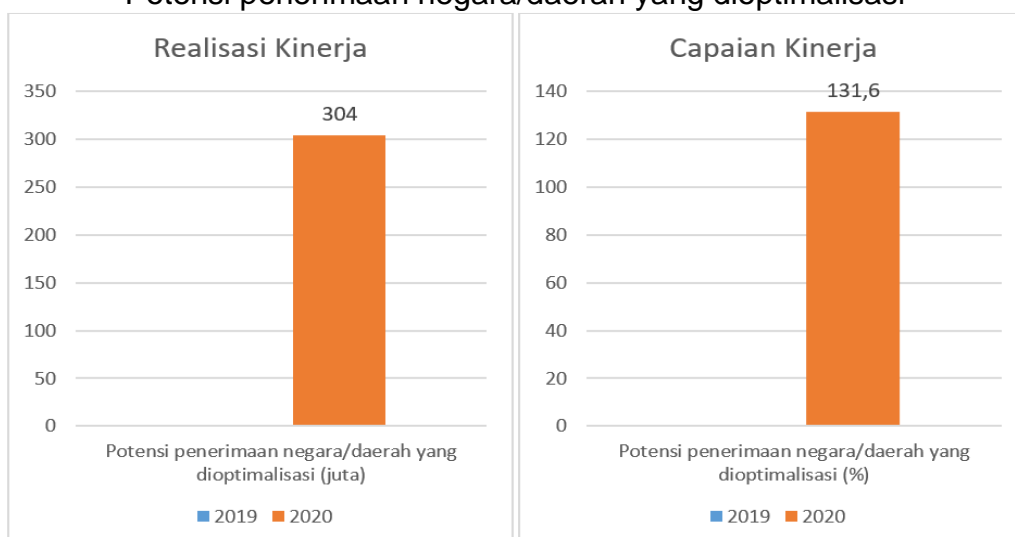
Tingginya pencapaian ini dikarenakan wajib pajak tertib dalam pembayaran pajak daerah.

Tabel 3.4
Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah						
	Tahun 2019			Tahun 2020			Capaian Naik/ (Turun)
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target (Juta)	Realisasi (Juta)	Capaian	
Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi	0	0	0	231	304	131,45%	131,45%

Realisasi IKU “Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi” tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2019 dikarenakan tidak terdapat realisasi tersebut di IKU tahun 2019.

Gambar 3.2
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi



1.4.

Nilai penyelamatan keuangan negara

IKU “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara” merupakan salah satu IKU penunjang Sasaran Strategis “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah” yang nilai kinerjanya diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi Nilai Penyelamatan Keuangan Negara} = \frac{\Sigma \text{Nilai Penyelamatan Keuangan Negara tahun 2020}}{\text{Target Nilai Penyelamatan Keuangan Negara}} \times 100\%$$

Realisasi Nilai Penyelamatan Keuangan Negara adalah Rp62.400.000.000,00 atau tercapai 230,05% dari target tahun 2020 sebesar Rp27.124.000.000,00. Realisasi tersebut juga sudah melebihi target Renstra 2020. Nilai tersebut dicapai melalui kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh seluruh bidang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nilai sebesar Rp1.890.000.000,00 diperoleh dari hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang investigasi;
- b. Nilai sebesar lebih kurang Rp43.360.000.000,00 diperoleh dari penyelamatan keuangan negara atas Pemberian Keterangan Ahli kasus di tahun 2019 yang baru disidangkan pada tahun 2020;
- c. Nilai sebesar Rp15.370.000.000,00 diperoleh dari koreksi atas kelebihan nilai kontrak dari kegiatan reviu yang dilaksanakan oleh Bidang IPP;
- d. Nilai sebesar Rp108.730.000,00 diperoleh dari temuan hasil Audit PID pada Satker P3MD Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh Bidang IPP;
- e. Esifisien keuangan negara dari Laporan Hasil Audit Paket Pekerjaan Darurat Bencana pada BPJN Gorontalo total senilai lebih kurang Rp314.000.000,00;

- f. Efisiensi keuangan negara dari AN dari efisiensi penggantian biaya pelayanan pasien covid-19 sebesar lebih kurang Rp967.000.000,00;
- g. Efisiensi keuangan negara dari AN dari efisiensi penyaluran insentif tenaga kesehatan sebesar Rp390.398.425,00.

Capaian indikator Nilai Penyelamatan Keuangan Negara disajikan pada Tabel 3.5

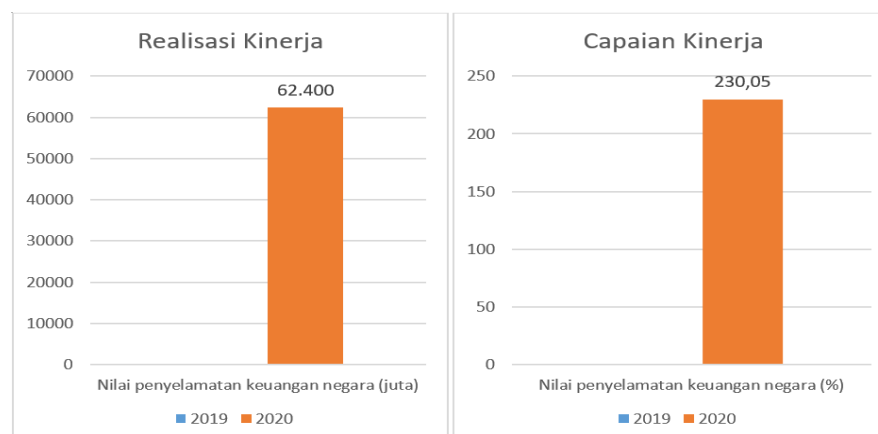
Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja
Nilai Penyelamatan Keuangan Negara

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah						Capaian Naik/ (Turun)
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2019			Tahun 2020			
	Target	Realisasi	Capaian	Target (Juta)	Realisasi (Juta)	Capaian	
Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	-	-	-	27.124	62.400	230,05%	230,05 %

Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, disebabkan belum terdapat IKU “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara” di tahun 2019

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2020 disajikan pada Gambar 3.3

Gambar 3.3
Capaian Indikator Kinerja
Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah



Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Sasaran Strategis Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional merupakan Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur berdasarkan tiga indikator kinerja. Capaian sasaran strategis dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.6

Tabel 3.6
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU
Sasaran Strategis Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas
Pembangunan Nasional

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1	Jumlah KP yang diawasi	Buah	7	11	157,14
2.2	Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Buah	7	11	157,14
2.5	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	%	75,00	75,00	100,00

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa dari tiga IKU yang mendukung capaian sasaran strategis “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional”, seluruh IKU memiliki capaian 100% atau lebih. Uraian masing-masing IKU sasaran program “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional” ini sebagai berikut:

2.1.

Jumlah KP yang diawasi

IKU “Jumlah KP yang diawasi” merupakan jumlah Pemerintah Daerah yang dilakukan pengawasan terhadap program prioritasnya. Penugasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) dalam Program Prioritas ini adalah

sebanyak empat penugasan, yakni 1).Evaluasi atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, 2).Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, 3).Kegiatan Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pendidikan (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020) pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dan 4).Evaluasi atas Kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa pada Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

Selain itu juga terdapat penugasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat sebanyak tujuh penugasan, yakni 1).Monitoring Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2020, 2).Pemantauan atas Pelaksanaan Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi pada Provinsi Gorontalo Tahun 2020, 3).Monitoring Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan kegiatan Eksplorasi Air Tanah pada Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, 4).Monitoring Atas Pelaksanaan Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Pangan Tahun 2020 pada Provinsi Gorontalo, 5).Pemantuan Program Lintas Sektoral atas Program Prioritas Meningkatkan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan Tahun 2020, 6).Pemantauan Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan Tahun 2020 di Kabupaten Gorontalo, dan 7).Reviu Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan IPTEK-INOVASI (PN1PP3) di Provinsi Gorontalo.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Jumlah KP Yang Diawasi} = \frac{\Sigma \text{Realisasi KP Yang Diawasi}}{\Sigma \text{Target KP Yang Diawasi}} \times 100\%$$

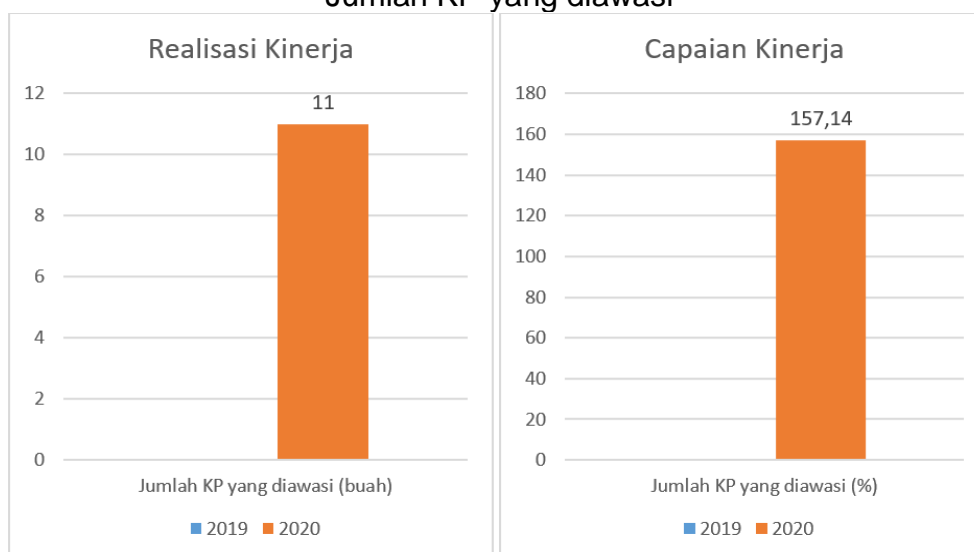
Realisasi IKU “Jumlah KP Yang Diawasi” tahun 2020 adalah sebesar 11 (sebelas) kegiatan atau tercapai 157,14% dari target sebesar 7 (tujuh) kegiatan. Realisasi tersebut juga sudah melebihi target Renstra 2020.

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja
Jumlah KP yang diawasi

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional						Capaian Naik/ (Turun)
	Tahun 2019			Tahun 2020			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah KP yang diawasi	0	0	0	7	11	157,14%	157,14%

Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, disebabkan belum terdapat IKU “Jumlah KP yang diawasi” di tahun 2019. Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2020 disajikan pada Gambar 3.4

Gambar 3.4
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
Jumlah KP yang diawasi



2.2.

Jumlah KP yang tercapai sesuai target

IKU “Jumlah KP yang tercapai sesuai target” merupakan jumlah KP yang telah terlaksana sesuai target. IKU tersebut merupakan pelaksanaan KP yang diawasi dan telah selesai sesuai target.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Jumlah KP Yang Tercapai Sesuai Target} = \frac{\Sigma \text{Realisasi Jumlah KP}}{\Sigma \text{Target Jumlah KP}} \times 100\%$$

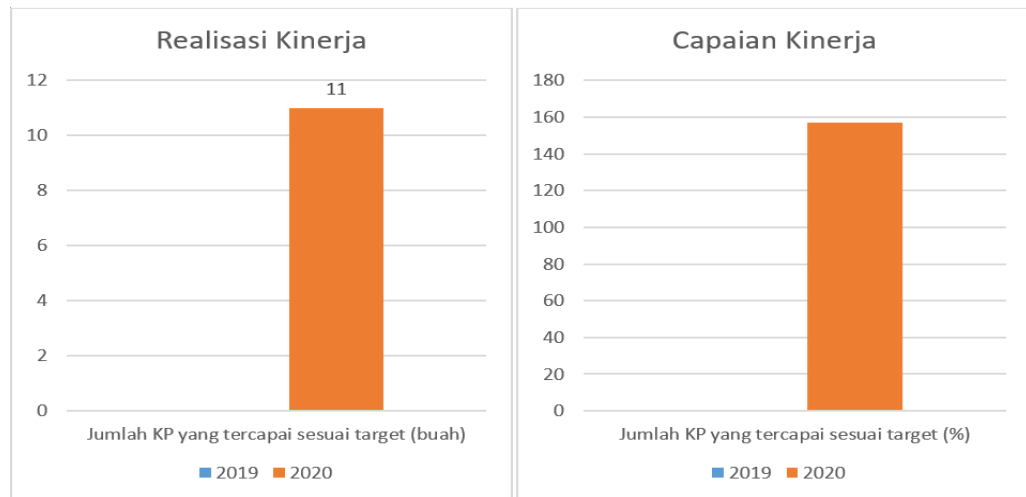
Realisasi IKU “Jumlah KP Yang Tercapai Sesuai Target” tahun 2020 adalah sebesar 11 (sebelas) kegiatan atau tercapai 157,14% dari target sebesar 7 (tujuh) kegiatan.

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja
Jumlah KP yang tercapai sesuai target

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional						
	Tahun 2019			Tahun 2020			Capaian Naik/ (Turun)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah KP yang tercapai sesuai target	0	0	0	7	11	157,14%	157,14%

Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, disebabkan belum terdapat IKU “Jumlah KP Yang Tercapai Sesuai Target” di tahun 2019. Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2020 disajikan pada Gambar 3.5

Gambar 3.5
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
Jumlah KP Yang Tercapai Sesuai Target



2.5. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan

IKU “Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan” mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan} = \frac{\sum \text{LEHKP diselesaikan 2020}}{\sum \text{LEHKP 2020}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan” tahun 2020 adalah sebesar 75% atau tercapai 100% dari target sebesar 75%, dengan perhitungan satu Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak pada tahun 2020 dibandingkan dengan satu Laporan EHKP pada tahun 2020. Pihak-pihak yang terlibat dalam Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) telah sanggup menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang diuraikan dalam isi laporan.

Analisis capaian IKU “Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan” sampai dengan tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja
Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

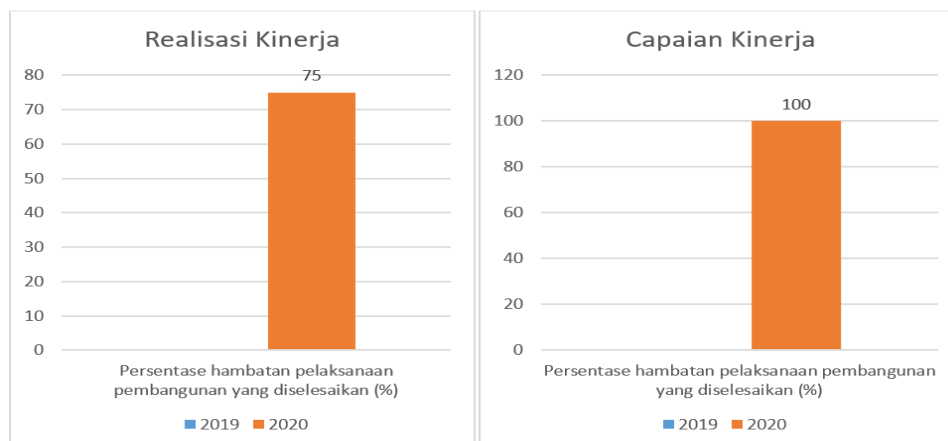
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional						
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2019			Tahun 2020			Capaian Naik/ (Turun)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	80%	100%	125%	75%	75%	100%	(25,%)

Realisasi IKU tahun 2020 sebesar 75% mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 100%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2020 menurun sebesar 25% menjadi 100% dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 125%.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2020 sebesar 75%, maka realisasi IKU tahun 2020 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2020 telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2020 disajikan pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan



Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

Sasaran program “ Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” merupakan upaya mendukung agenda prioritas pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengawasan untuk mendukung tata kelola pemerintah dan korporasi yang bersih dan efektif, serta diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan secara akuntabel, transparan, dan efektif.

Capaian sasaran program diukur melalui satu IKU dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Strategis
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.2	Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat	Unit	2	1	50,00
3.3	Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat	Unit	1	2	200,00
3.4	Jumlah Bumdes mampu menyusun LK	Unit	14	14	100,00

Sasaran program “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” didukung oleh capaian tiga IKU. Uraian capaian IKU sebagai berikut:

3.2.

Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat

IKU “Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat” merupakan IKU dalam rangka mendukung target Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah melakukan evaluasi kinerja pada PDAM di wilayah Provinsi Gorontalo.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi} = \frac{\Sigma \text{BUMD yg kinerjanya minimal baik/sehat}}{\Sigma \text{BUMD yang dievaluasi}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi” tahun 2020 atas kinerja BUMD tahun 2019 adalah sebesar 1 BUMD atau tercapai 50,00% dari target sebanyak 2 BUMD, daftar predikat kinerja PDAM selengkapnya disajikan pada Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Hasil Evaluasi Kinerja PDAM

No	PDAM	Skor	Predikat
1	Kota Gorontalo	2,88	Sehat
2	Kab. Boalemo	2,48	Kurang Sehat
3	Kab. Bone Bolango	2,46	Kurang Sehat
4	Kan. Gorontalo	2,40	Kurang Sehat
5	Kab. Pohuwato	2,04	Sakit
6	Kab. Gorontalo Utara	1,83	Sakit

Dari hasil evaluasi tahun 2020 diidentifikasi permasalahan kinerja yang paling signifikan pada PDAM sebagaimana disajikan pada Tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Permasalahan kinerja PDAM

No	Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian	Jumlah PDAM
1	Bentuk Badan Hukum Perusahaan Belum Sesuai Dengan PP Nomor 54 Tahun 2017	2
2	Uji Kualitas Air yang Dilaksanakan oleh Perusahaan Belum Sesuai dengan Permenkes Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010	2
3	PDAM Belum Menyusun Laporan Bulanan Dengan Tertib	2
4	Laporan Produksi dan Distribusi Air Belum Didukung Dengan Sumber Data perhitungan dan Asumsi yang Digunakan Dalam menghitung Jumlah Produksi dan Distribusi Air	2
5	Struktur tarif air belum disesuaikan dengan peraturan yang baru	1
6	Jumlah Direksi PUDAM Tidak Sesuai dengan Ketentuan	1
7	Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur PDAM Kota Gorontalo Melebihi 6 (Enam) Bulan	1
8	Terdapat Perbedaan Penyajian Nilai Beban Penyisihan Piutang Dalam Laporan Keuangan (<i>Audited</i>) Perusahaan	1
9	Saldo piutang usaha tahun 2019 berbeda antara Bagian Keuangan dan Bagian Hubungan Langganan	1
10	RKAP Tidak Sistematis	1
11	Permasalahan pada Laporan Keuangan Audited Tahun 2019	1
12	Laporan Keuangan Audited Tidak Melampirkan Koreksi Audit atau Tidak Didukung Daftar Rincian Aktiva	1

No	Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian	Jumlah PDAM
13	Pencatatan Kerugian pada Laporan Keuangan	1
14	Pencatatan Laporan Arus Kas Belum Menggambarkan Kondisi Sebenarnya	1
15	Subsidi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tidak Seluruhnya Ditagihkan Perusahaan	1
16	Pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pohuwato kepada PDAM Tirta Maleo Tidak Menggambarkan Kondisi Sebenarnya	1
17	Pencatatan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Belum Menggambarkan Kondisi Sebenarnya	1
18	Terdapat Pencatatan Ganda atas Aktiva Tetap pada Laporan Keuangan Audited Tahun 2018 & 2019	1

Analisis capaian IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi” sampai dengan tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja
BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha						Capaian Naik/ (Turun)
	Tahun 2019			Tahun 2020			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi	60,00%	33,33%	55,56%	2 BUMD	1 BUMD	50,00%	(5,56%)

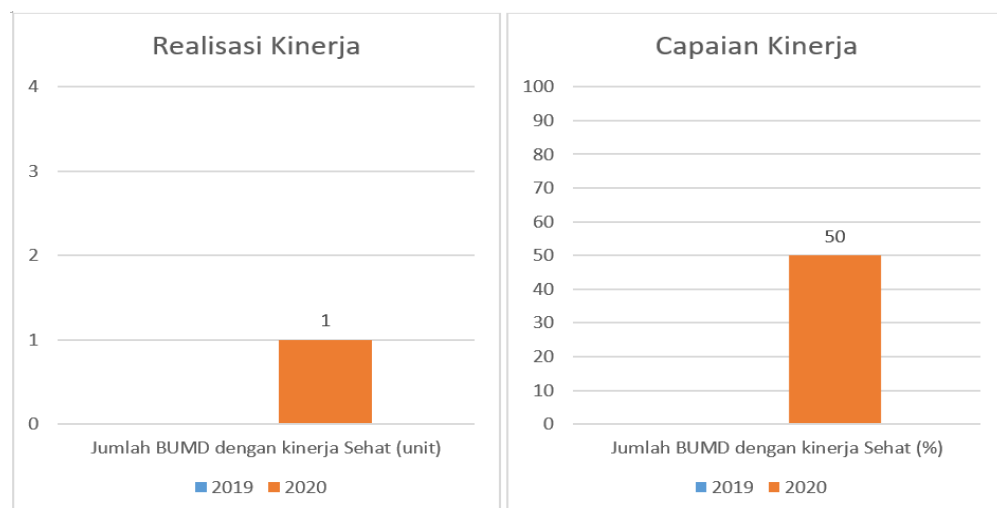
Realisasi IKU sampai dengan tahun 2020 sebesar 1 BUMD atau 16,67%, turun sebesar 16,67% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 33,33%. Capaian IKU tahun 2020 menurun sebesar 5,56% menjadi 50,00% dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 55,56%. Faktor penyebab menurunnya realisasi maupun capaian IKU antara lain karena

ada metode perhitungan dalam aplikasi khususnya terkait kualitas air, mensyaratkan bahwa satu titik sample yang diuji harus memenuhi 4 parameter yaitu fisik, mikrobiologi, kimia wajib dan kimia tambahan, apabila tidak memenuhi salah satu parameter tersebut dianggap tidak memenuhi syarat air minum.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2020 sebanyak 2 BUMD berpredikat baik maka capaian IKU tahun 2020 hanya mencapai 1 BUMD. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2020 tidak tercapai.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2020 disajikan pada Gambar 3.7

Gambar 3.7
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi



3.3.

Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat

IKU “BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi” merupakan IKU dalam rangka Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha di wilayah Provinsi Gorontalo.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi} = \frac{\Sigma \text{BLUD yang tata kelolanya minimal baik}}{\Sigma \text{BLUD yang dievaluasi}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi” adalah sebanyak 2 BLUD atau tercapai 200,00% dari target sebanyak 1 BLUD. Jumlah BLUD di Provinsi Gorontalo sebanyak 5 BLUD dan sampai dengan tahun 2020 telah dilakukan evaluasi sebanyak 3 BLUD dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.14
Hasil Evaluasi Kinerja BLUD

No	Nama BLUD	Skor Evakin	Predikat
1	RSUD Prof. Dr. Aloei Saboe	69,50	A (Baik)
2	RSUD Tani dan Nelayan	66,38	A (Baik)
3	RSUD Toto Kabila	58,39	BBB (Sedang)

Analisis capaian IKU “Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi” sampai dengan tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan sebagai berikut:

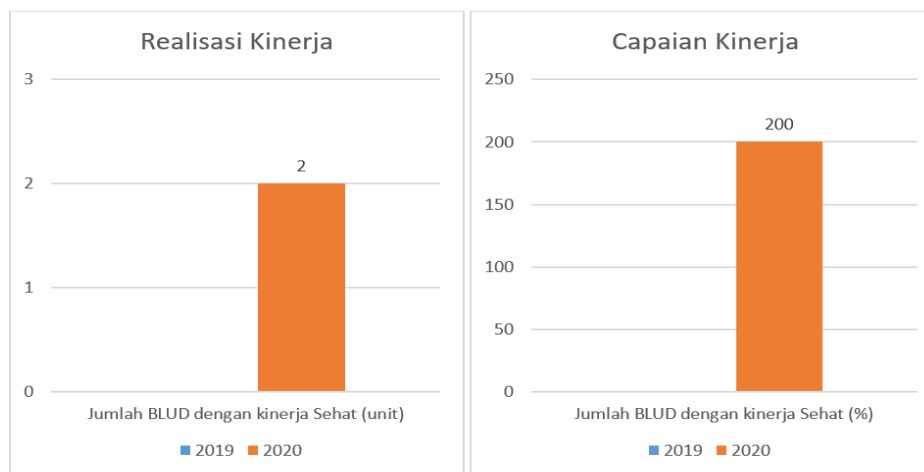
Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja
Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha							
	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2019			Tahun 2020			Capaian Naik/ (Turun)
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi	65,00%	66,67%	102,57%	1 BLUD	2 BLUD	200,00%	97,43%	

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2020 sebesar 2 BLUD atau 200,00% dari target sebanyak 1 BLUD, dibandingkan dengan realisasi tahun 2019

tidak mengalami perubahan. Capaian IKU tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 97,43% yang disebabkan penurunan target kinerja IKU tersebut di tahun 2020 yang mana di tahun 2019 ditetapkan target sebanyak 2 BLUD atau 65% diturunkan menjadi 1 BLUD atau sebesar 33%.

Gambar 3.8
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi



3.4.

BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan

IKU “Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan” merupakan IKU dalam rangka mendukung target meningkatnya Pegawai Pembinaan atas Badan Usaha.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan} = \frac{\Sigma \text{BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan}}{\Sigma \text{target BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan di tahun 2020}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan” tahun 2020 adalah sebanyak 14 BUMDes atau 100,00% dari yang ditarget sebanyak 14 BUMDes. Jumlah BUMDes yang ada di Provinsi Gorontalo sebanyak 646 BUMDes yang tersebar di 5 Kabupaten, adapun jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan diperoleh berdasarkan

hasil pemantauan atas peran BUMDes dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan BUMDes bersama dalam mendukung penguatan kewirausahaan dan UMKM dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16
BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan

No	Kabupaten	Nama Bumdes	Laporan Keuangan			
			Neraca/ LPK	Laba/Lap Hasil Usaha	Lap Arus Kas	Lap Perubahan Modal
1	Gorontalo	Anugrah	1	1	1	1
2	Gorontalo	Tunas Harapan	1	1	1	1
3	Gorontalo	Bina Usaha	1	1	1	1
4	Boalemo	Tinelo	1	1	1	1
5	Boalemo	Gowali Sejahtera	1	1	1	1
6	Boalemo	Makmur Abadi	1	1	1	1
7	Bone Bolango	Karya Mandiri	1	1	1	1
8	Bone Bolango	Cahaya Lamahu	1	1	1	1
9	Pahuwato	Panua Mandiri	1	1	1	1
10	Pahuwato	Rojo Koyo	1	1	1	1
11	Pahuwato	Mitra Warga	1	1	1	1
12	Gorontalo Utara	Pelangi	1	1		1
13	Gorontalo Utara	Teratai jaya	1	1		1
14	Gorontalo Utara	Cahaya Indah	1	1	1	1

Dari 14 BUMDes yang telah mampu menyusun laporan keuangan terdapat 2 BUMDes di Gorontalo Utara (BUMDes Pelangi dan BumDes Teratai Jaya) yang belum membuat Laporan Arus Kas. Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM), Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal tidak wajib dibuat oleh entitas Mikro Kecil dan Menengah.

Analisis capaian IKU “BUMDes yang mampu Menyusun laporan keuangan” sampai dengan tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan sebagai berikut:

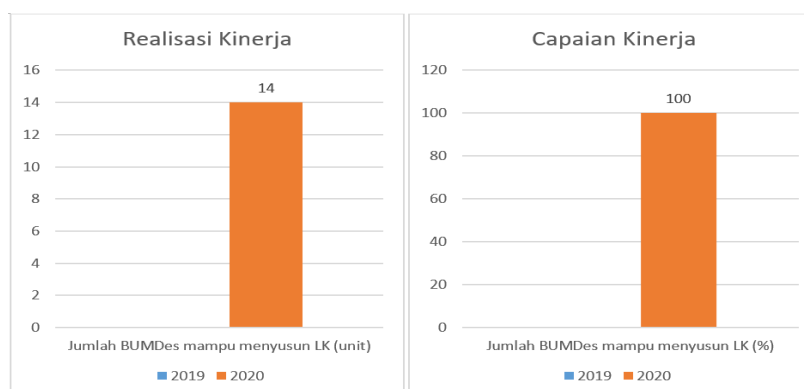
Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja
BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha						Capaian Naik/ (Turun)
	Tahun 2019			Tahun 2020			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan	-	-	-	14	14	100,00%	100,00%

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2020 sebesar 100,00%, naik 100,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 0%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2020 naik sebesar 100,00% menjadi 100,00% dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 0,00%. Faktor pendukung meningkatnya realisasi maupun capaian IKU antara lain disebabkan meningkatkan perkembangan usaha BUMDes dan pengelolaan SDM sehingga membutuhkan laporan keuangan dalam rangka mendapatkan investasi dari pihak luar, selain itu peningkatan capaian IKU ini juga disebabkan tidak terdapat target BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan di tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2020 sebesar 100,00%, maka capaian IKU tahun 2020 mencapai 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2020 telah tercapai.

Gambar 3.9
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase BUMDes yang mampu Menyusun laporan keuangan



Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Sasaran Program “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi” merupakan upaya mendukung capaian Sasaran Program Pengawasan Pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian;
- b. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi.

Capaian sasaran program diukur melalui dua IKU dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian
IKU Sasaran Program Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.1	Presentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	100	100	100,00
4.2	Presentase hasil pengawasan prefentif dan edukatif yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	70	70	100,00

Tabel 3.18 menunjukkan bahwa dari dua IKU yang mendukung capaian sasaran program “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi”, seluruhnya memiliki capaian 100%.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi” adalah sebagai berikut:

4.1.

***Presentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/
dimanfaatkan***

IKU “Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan” merupakan tingkat penyelesaian pengawasan represif bidang investigasi berupa Audit Investigatif, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Audit Tujuan Tertentu yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan} = \frac{\Sigma \text{LHAI+LHAPKKN+LHATT yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan 2020}}{\Sigma \text{LHAI+LHAPKKN+LHATT yang terbit 2020}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan” tahun 2020 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan sebanyak 4 Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI), 3 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN), dan 2 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (LHATT) yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan pada tahun 2020 dibandingkan dengan 4 LHAI, 3 LHAPKKN, dan 2 LHATT yang diterbitkan pada tahun 2020.

Analisis capaian IKU “Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan” sampai dengan tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.19
Capaian Indikator Kinerja
Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan

Sasaran Strategis 4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi						Capaian Naik/ (Turun)
	Tahun 2019			Tahun 2020			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan	-	-	-	100%	100%	100,00%	-

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2020 sebesar 100%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2020 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2020 harus dipertahankan.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2020 disajikan pada Gambar 3.10.

Gambar 3.10
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan



4.2.

Presentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan

IKU “Presentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan” merupakan tingkat penyelesaian pengawasan preventif dan edukatif berupa kegiatan *Fraud Risk Assessment* (FRA), *Fraud Control Plan* (FCP), Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh stakeholders.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Presentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan} = \frac{\Sigma \text{LAP Preventif dan Edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan 2020}}{\Sigma \text{LAP Preventif dan Edukatif yang terbit 2020}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Presentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan” tahun 2020 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan sebanyak 1 Laporan *Fraud Risk Assessment* (FRA), 2 Laporan *Fraud Control Plan* (FCP), 1 Laporan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dan 2 Laporan Sosialisasi Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh *stakeholders* pada tahun 2020 dibandingkan dengan 1 Laporan FRA, 2 Laporan FCP, 1 Laporan MPAK, dan 2 Laporan IEPK yang terbit pada tahun 2020.

Analisis capaian IKU “Presentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan” sampai dengan tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan sebagai berikut:

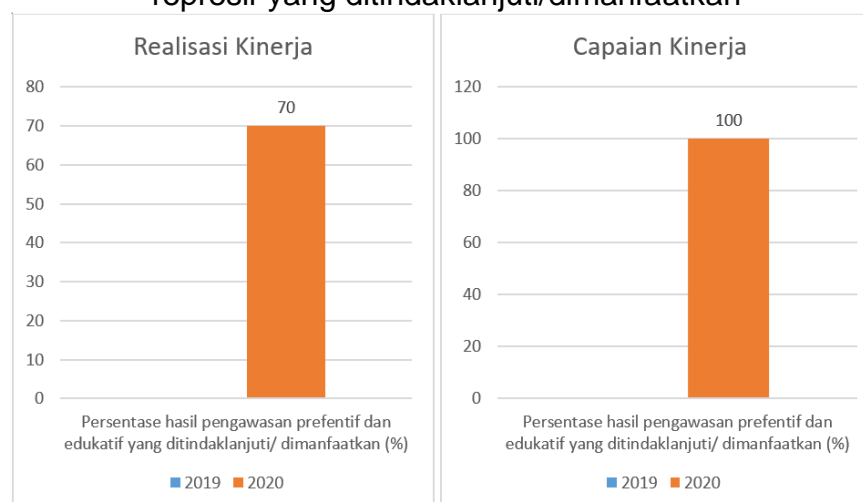
Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja
Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang
ditindaklanjuti/dimanfaatkan

Sasaran Strategis 4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi						
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2019			Tahun 2020			Capaian Naik/ (Turun)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan	-	-	-	70,00%	70,00%	100,00%	-

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2020 sebesar 100%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2020 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2020 harus dipertahankan.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2020 disajikan pada Gambar 3.11

Gambar 3.11
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase hasil pengawasan
represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan



Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU BPKP didukung dengan pencapaian Sasaran Program Pengawasan Pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha;

Sasaran Strategis tersebut di atas akan dicapai dan diukur melalui capaian tujuh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2020. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam merealisasikan pengawasan pembangunan atas efektivitas kualitas pengendalian intern K/L/P/BU secara optimal, lengkap, tepat nilai dan bebas dari penyimpangan, terdiri dari:

Tabel 3.21
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian
IKU Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
5.1	Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Unit	7	7	100,00
5.2	Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Unit	7	7	100,00
5.4	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Unit	1	0	0
5.5	Persentase jumlah pemda yg akuntabel pengelolaan keuangan dan kinerja	%	14,29	100	700,00
5.6	Tersedianya rekomendasi strategis prov/kab/kota	%	1	1	100,00

No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
5.7	Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa	%	40,03	100	249,81
5.9	Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes	Unit	1	1	100,00

Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU” ini adalah:

5.1. ***Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3***

IKU “Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3” merupakan Indikator yang memperlihatkan jumlah APIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mencapai level 3 Kapabilitas APIP.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP} \geq \text{Level 3} = \frac{\sum \text{PemProv/kab/kota Min Level 3 APIP}}{\sum \text{Seluruh PemProv/kab/kota}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3” tahun 2020 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan tujuh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan kapabilitas minimal level 3 APIP dibandingkan dengan tujuh APIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 3 sebagai berikut:

Tabel 3.22
Capaian Level Kapabilitas APIP s.d. 31 Desember 2020

No.	Nama APIP	Skor	Level	Status
1.	Kota Gorontalo	3	3	Reviu Rendal
2.	Kabupaten Gorontalo	3	3	Reviu Rendal
3.	Kabupaten Boalemo	3	3	Reviu Rendal
4.	Kabupaten Bone Bolango	3	3	Reviu Rendal
5.	Kabupaten Gorontalo Utara	3	3	Reviu Rendal
6.	Kabupaten Pohuwato	3	3	Reviu Rendal
7.	Provinsi Gorontalo	3	3	Reviu Rendal

Analisis capaian IKU “Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” sampai dengan tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.23
Capaian Indikator Kinerja
Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

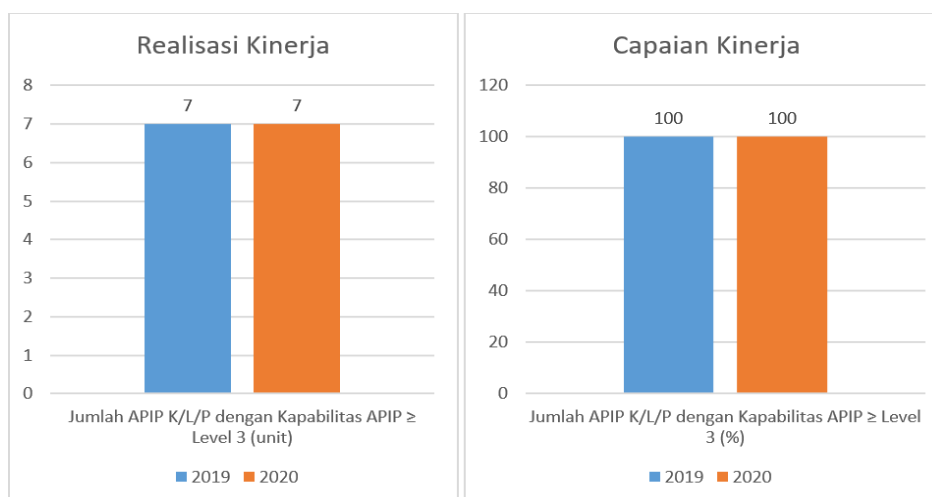
Sasaran Strategis 5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						
	Tahun 2019			Tahun 2020			Capaian Naik/ (Turun)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	7	7	100%	7	7	100%	-

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2020 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2019 sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan target awal periode Renstra pada Tahun 2020 sebesar 100%, maka realisasi IKU tahun 2020 telah mencapai target yang diharapkan.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2020 disajikan pada Gambar 3.12.

Gambar 3.12
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3



5.2.

Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

IKU “Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” merupakan wujud dari proses *governance* Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP } \geq \text{Level 3} = \frac{\sum \text{PemProv/kab/kota Min Level 3 SPIP}}{\sum \text{seluruh Pemkab/kota}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” tahun 2020 adalah sebesar 100% atau mencapai 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan 7 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP minimal level 3 dibandingkan dengan 7 Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah mencapai maturitas SPIP level 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24
Capaian Level Maturitas SPIP s.d. 31 Desember 2020

No	Nama Pemda	Skor	Level	Status
1.	Provinsi Gorontalo	3,1250	3	QA Rendal
2.	Kota Gorontalo	3,1057	3	QA Rendal
3.	Kabupaten Boalemo	3,0000	3	QA Rendal
4.	Kabupaten Bone Bolango	3,0000	3	QA Rendal
5.	Kabupaten Gorontalo	3,0830	3	QA Rendal
6.	Kabupaten Gorontalo Utara	3,0000	3	QA Perwakilan
7.	Kabupaten Pohuwato	3,0455	3	QA Rendal

Analisis capaian IKU “Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” sampai dengan tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.25
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
Tahun 2019 dan 2020

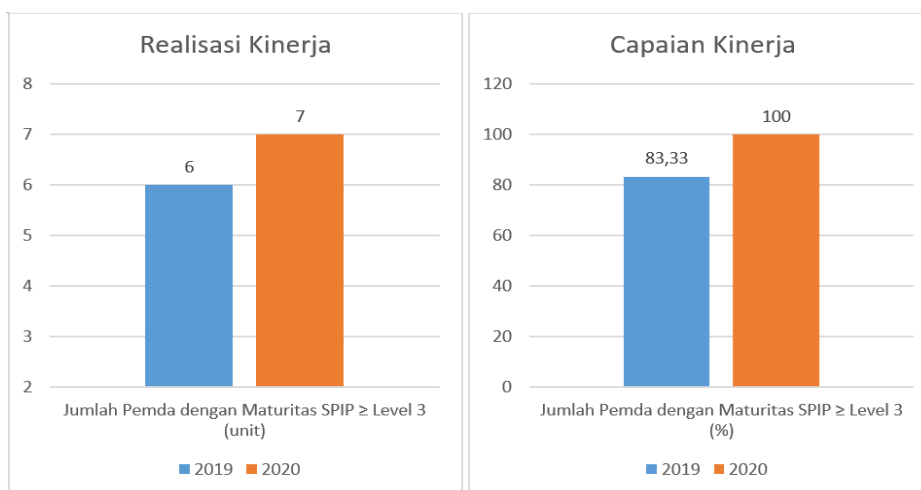
Sasaran Strategis 5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						
	Tahun 2019			Tahun 2020			Capaian Naik/ (Turun)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	7	6	83,33%	7	7	100%	16,67%

Realisasi IKU tahun 2020 adalah sebesar 100%, lebih tinggi dari realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 83,33%.

Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2020 meningkat sebesar 16,67% menjadi 100% dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 83,33%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2020

adalah 7 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, maka realisasi IKU tahun 2020 adalah seluruh Pemda atau sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2020 tercapai.

Gambar 3.13
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3



5.4.

Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3

IKU “Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3” sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas “Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi”. Pemerintah menargetkan sebanyak 79,31% Kementerian/Lembaga, 62% Pemerintah Provinsi, dan 39% Pemerintah Kabupaten Kota berada pada Level 3 Indeks Penerapan Manajemen Risiko di akhir periode RPJMN.

Indikator yang mencerminkan nilai kinerja dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Jumlah Pemda dengan MRI } \geq \text{Level 3} = \frac{\sum \text{PemProv/kab/kota Min Level 3 MRI}}{\sum \text{target PemProv/kab/kota Min Level 3 MRI}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3” tahun 2020 adalah sebesar 0% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan tidak

terdapat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan MRI minimal Level 3 dibandingkan dengan satu Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi target IKU tahun 2020.

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah melakukan Penyusunan *Baseline* Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Gorontalo Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.26
Penilaian *Baseline* MRI s.d. 31 Desember 2020

No.	Nama Pemda	Nilai <i>Baseline</i> MRI
1.	Provinsi Gorontalo	2,16
2.	Kota Gorontalo	2,43
3.	Kabupaten Boalemo	1,85
4.	Kabupaten Bone Bolango	2,37
5.	Kabupaten Gorontalo	2,26
6.	Kabupaten Gorontalo Utara	2,04
7.	Kabupaten Pohuwato	2,50

Tabel 3.27
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3 Tahun 2019 dan 2020

Sasaran Strategis 5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						
	Tahun 2019			Tahun 2020			Capaian Naik/ (Turun)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	0	0	0	1	0	0	0

Analisis capaian IKU “Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3” sampai dengan tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2019 karena pada tahun 2019 belum ada target capaian IKU “Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3”.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2020 sebanyak 1 Pemda, maka realisasi IKU tahun 2020 sebesar 0% yang menunjukkan bahwa kinerja tahun 2020 belum tercapai.

Dalam melaksanakan penyusunan *baseline* MRI, hal yang menjadi hambatan adalah adanya potensi responden dalam memberikan jawaban yang ekstrem. Oleh sebab itu diperlukan tindak lanjut berupa pembinaan lebih lanjut atas area-area yang memerlukan perbaikan dan penjaminan kualitas atas penerapan manajemen risiko.

Gambar 3.14
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3



5.5. ***Persentase jumlah pemda yg akuntabel pengelolaan keuangan dan kinerja***

IKU “Presentase Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja” merupakan jumlah Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan opini WTP laporan keuangan dan nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

$$\begin{array}{l}
 \text{Realisasi IKU Presentase} \\
 \text{Jumlah Pemda Yang} \\
 \text{Akuntabel Pengelolaan} \\
 \text{Keuangan dan Kinerja}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \Sigma \text{ Realisasi Jumlah Pemda} \\
 \text{Yang Akuntabel} \\
 \text{Pengelolaan Keuangan dan} \\
 \text{Kinerja}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \Sigma \text{ Target Jumlah Pemda} \\
 \text{Yang Akuntabel} \\
 \text{Pengelolaan Keuangan dan} \\
 \text{Kinerja}
 \end{array}} \times 100\%$$

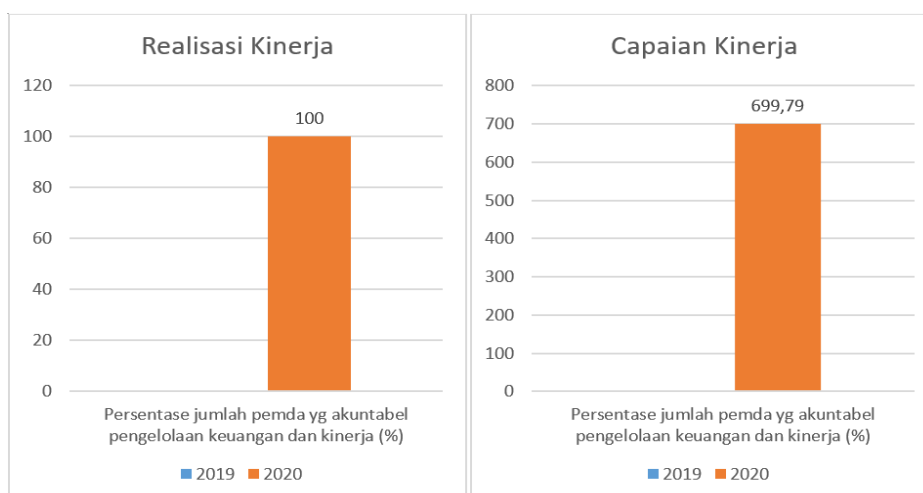
Realisasi IKU “Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja” tahun 2020 adalah sebesar 100% atau tercapai 700% dari target sebesar 14,29%. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 untuk seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo telah mendapat WTP dan Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 untuk semua Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo sudah mendapat nilai “B” dan “BB”.

Tabel 3.28
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja
Tahun 2019 dan 2020

Sasaran Strategis 5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						Capaian Naik/ (Turun)
	Tahun 2019			Tahun 2020			
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	0	0	0	1	7	700%	700%

Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, disebabkan belum terdapat IKU “Presentase Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja” di tahun 2019.

Gambar 3.15
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja



5.6.

Tersedianya rekomendasi strategis prov/kab/kota

IKU “Tersedianya rekomendasi strategis prov/kab/kota” merupakan bentuk kegiatan *consultancy* Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang diwujudkan dengan pemberian rekomendasi strategis, yaitu rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja Pemerintah Daerah. Rekomendasi tersebut berfungsi sebagai langkah pencegahan, perbaikan, ataupun mitigasi risiko, serta memastikan pencapaian pembangunan nasional dan sasaran strategis Pemerintah Daerah. Ringkasnya, sebagai auditor pemerintah BPKP berperan secara signifikan dalam membantu manajemen pemerintahan mencapai sasaran strategis dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta bebas dari Penyimpangan/KKN.

Indikator yang mencerminkan nilai kinerja dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Tersedianya Rekomendasi Strategis Prov/Kab/Kota} = \frac{\sum \text{Rekomendasi Strategis Prov/Kab/Kota}}{\sum \text{target Rekomendasi Strategis Prov/Kab/Kota}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Tersedianya rekomendasi strategis prov/kab/kota” tahun 2020 adalah sebesar 100% atau mencapai 100% dari target sebesar 1 Rekomendasi ke Prov/Kab/Kota. Rekomendasi diberikan dalam bentuk atensi dengan nomor surat S-1147/PW31/3/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo merupakan bentuk dari tanggapan atas rencana pengadaan 50 kendaraan roda dua sebagai salah satu tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Namun pengadaan tersebut menyalahi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

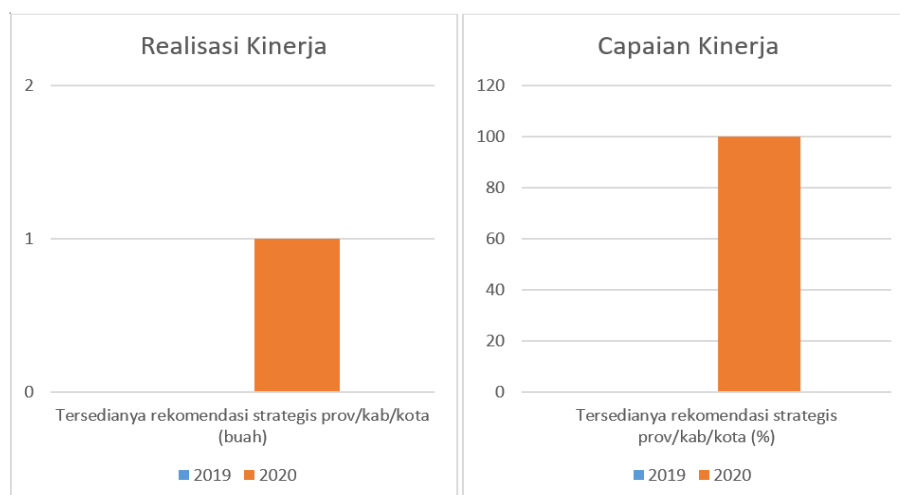
Analisis capaian IKU “Tersedianya rekomendasi strategis prov/kab/kota” sampai dengan tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2019 karena pada tahun 2019 tidak ada target capaian IKU “Tersedianya rekomendasi strategis prov/kab/kota”.

Tabel 3.29
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Tersedianya rekomendasi strategis prov/kab/kota
Tahun 2019 dan 2020

Sasaran Strategis 5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						Capaian Naik/ (Turun)
	Tahun 2019			Tahun 2020			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Tersedianya rekomendasi strategis prov/kab/kota	0	0	0	1	1	100%	100%

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2020 yaitu tersedianya rekomendasi strategis prov/kab/kota, maka realisasi IKU tahun 2020 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2020 tercapai

Gambar 3.16
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
Tersedianya rekomendasi strategis prov/kab/kota



5.7.

Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa

IKU “Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa” merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tata pemerintahannya dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Indikator yang mencerminkan nilai kinerja dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa} = \frac{\Sigma \text{Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa}}{\Sigma \text{target Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa” tahun 2020 adalah sebesar 100% atau mencapai 249,81% dari target sebesar 40,03%, dengan perhitungan 657 Pemerintah Desa yang telah menyusun LPJ Keuangan desa dibandingkan dengan 263 Pemerintah Desa yang menjadi target dalam IKU “Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa” tahun 2020.

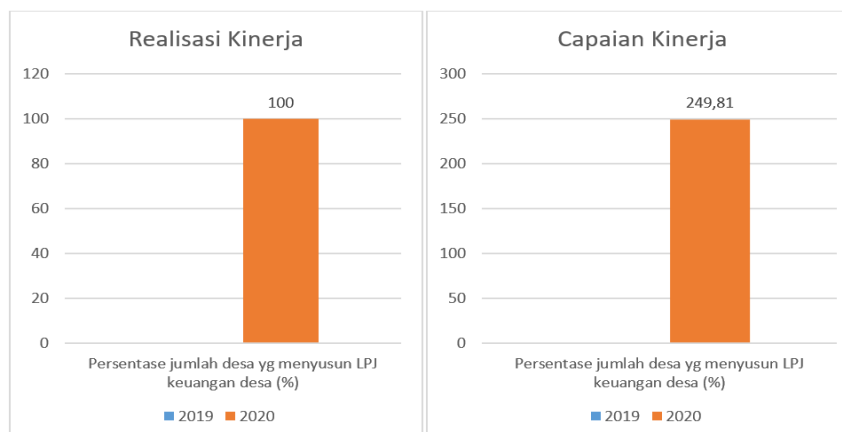
Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2020 yaitu Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa, maka realisasi IKU tahun 2020 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2020 tercapai.

Tabel 3.30
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa
Tahun 2019 dan 2020

Sasaran Strategis 5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						Capaian Naik/ (Turun)
	Tahun 2019			Tahun 2020			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa	0	0	0	40,03%	100%	249,81%	249,81%

Analisis capaian IKU “Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa” sampai dengan tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2019 karena pada tahun 2019 tidak ada target capaian IKU “Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa”.

Gambar 3.17
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa



5.9.

Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes

IKU “Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes” merupakan wujud pelaksanaan amanah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mencakup pelaksanaan dari wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa. Ruang lingkup pengawasan yang luas meliputi pengawasan pengelolaan keuangan terakit kegiatan antar desa / kawasan perdesaan, atau kegiatan bersama desa dan pihak lainnya, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa lainnya. Hal ini menjadi tantangan yang besar bagi aparat penawasan intern pemerintah (APIP) kabupaten untuk dapat menyelenggarakan pengawasan yang efektif atas pengelolaan keuangan desa.

Indikator yang mencerminkan nilai kinerja dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes} = \frac{\Sigma \text{ APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes}}{\Sigma \text{ target APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes”

tahun 2020 adalah sebesar 100% atau mencapai 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan 1 APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Siswaskeudes dibandingkan dengan 1 APIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi target IKU Tahun 2020.

Berikut merupakan monitoring perkembangan implementasi Siswaskeudes Provinsi Gorontalo:

Tabel 3.31
Implementasi Siswaskeudes di Provinsi Gorontalo s.d. 31 Desember 2020

No	Nama Pemda	Bimtek/ Sosialisasi	Implementasi
1.	Kabupaten Boalemo	1	-
2.	Kabupaten Bone Bolango	-	-
3.	Kabupaten Gorontalo	-	-
4.	Kabupaten Gorontalo Utara	-	-
5.	Kabupaten Pohuwato	1	1 *)

*). Surat permohonan Implementasi Siswaskeudes dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah dikirim ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

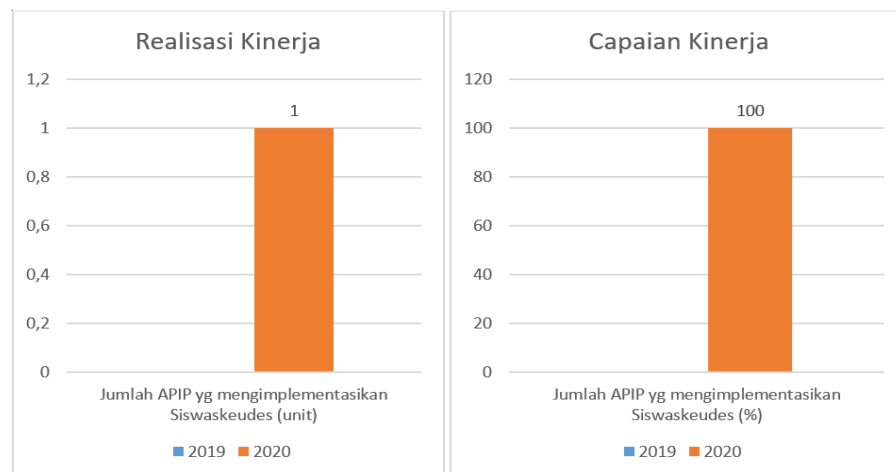
Upaya yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo untuk mencapai kinerja IKU “Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes” selama tahun 2020 yaitu melakukan Bimtek/Sosialisasi mengenai aplikasi Siswaskeudes kepada APIP di Inspektorat Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, dan *output* yang dihasilkan yaitu Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah mengirim surat permohonan implementasi aplikasi Siswaskeudes kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.32
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes
Tahun 2019 dan 2020

Sasaran Strategis 5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						Capaian Naik/ (Turun)
	Tahun 2019			Tahun 2020			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	0	0	0	1	1	100%	100%

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2020 yaitu Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes, maka realisasi IKU tahun 2020 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2020 tercapai. Analisis capaian IKU “Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes” sampai dengan tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2019 karena pada tahun 2019 tidak ada target capaian IKU “Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes”.

Gambar 3.18
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes



Sasaran Strategis 6
Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja

Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja” didukung dengan 12 IKU, yaitu:

Tabel 3.33
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian
IKU Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan

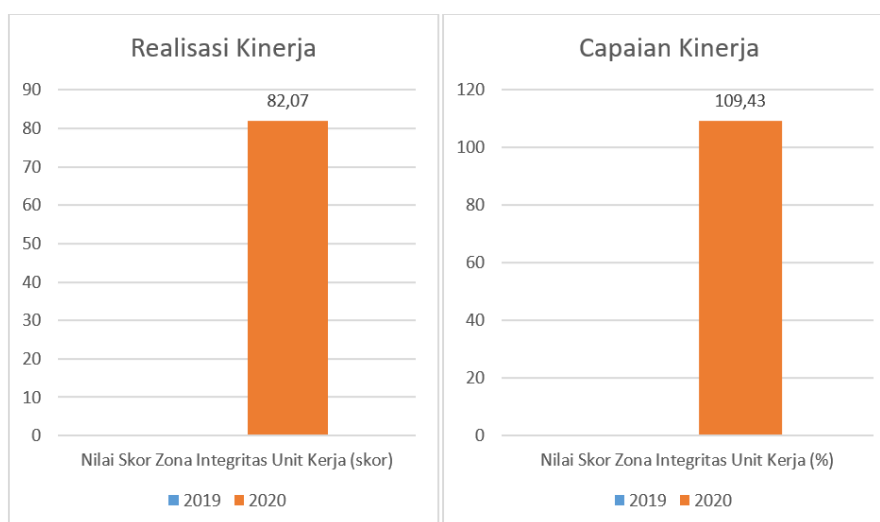
No.	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	75	82,07	109,43
6.2	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	100	100	100,00
6.3	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100,00
6.4	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100	100	100,00
6.5	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor	86	97,30	113,14
6.6	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	%	90	100	111,11
6.7	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	%	100	100	100,00
6.8	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor	Baik	Baik	100,00
6.9	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	80	84,04	105,05
6.10	Maturitas SPIP Unit Kerja	Skor	Level 3	Level 3	100,00
6.12	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Skor	70	78,78	112,54
6.13	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Skor	70	92,25	131,79

6.1.

Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

IKU “Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja” di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah dicapai dengan dilaksanakannya Penilaian Mandiri Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor S-1555/PW31/1/2020 tanggal 6 Juli 2020 dengan nilai sebesar 83,05 dan telah dievaluasi oleh Inspektorat BPKP dengan nilai 82,07 sesuai Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK pada Perwakilan BPKP Gorontalo Tahun 2020 Nomor LEV-072/IN/2020 tanggal 13 Juli 2020, lebih besar daripada target Perkin tahun 2020 sebesar 75,00.

Gambar 3.19
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

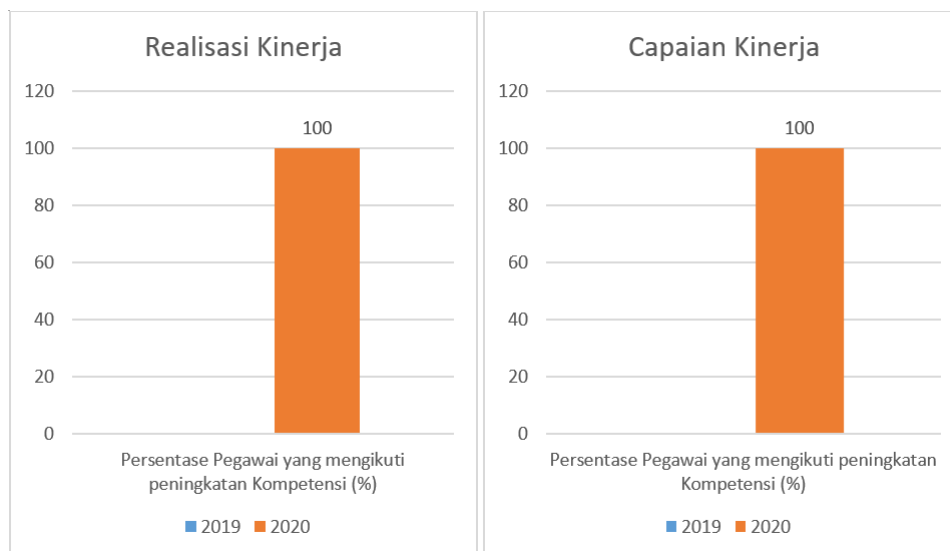


6.2.

Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi

IKU “Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi” di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah dicapai dengan nilai sebesar 100% (jumlah peserta Diklat berdasarkan penetapan sama dengan Sertifikat Mengikuti Diklat yang diterbitkan), sama dengan target Perkin tahun 2020 sebesar 100%.

Gambar 3.20
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi

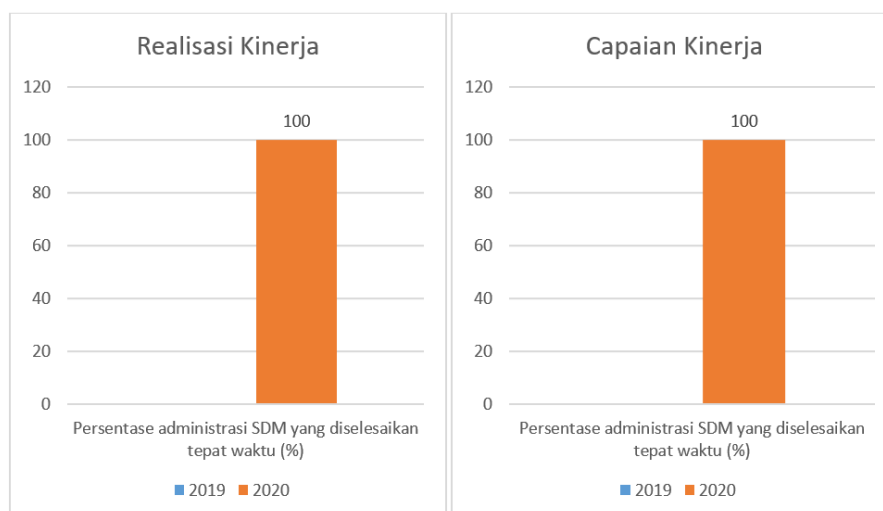


6.3.

Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu

IKU “Persentase Administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu” di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah dicapai dengan nilai sebesar 100%, sama dengan target Perkin tahun 2020 sebesar 100%.

Gambar 3.21
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu



6.4.

Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja

IKU “Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu” di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah dicapai sesuai dengan siklus penyusunan APBN 2021 dengan terbitnya DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor SP DIPA-089.01.2.689270/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai sebesar 100%, sama dengan target Perkin tahun 2020 sebesar 100%.

Gambar 3.22
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Penyusunan RKA
Tepat Waktu



6.5.

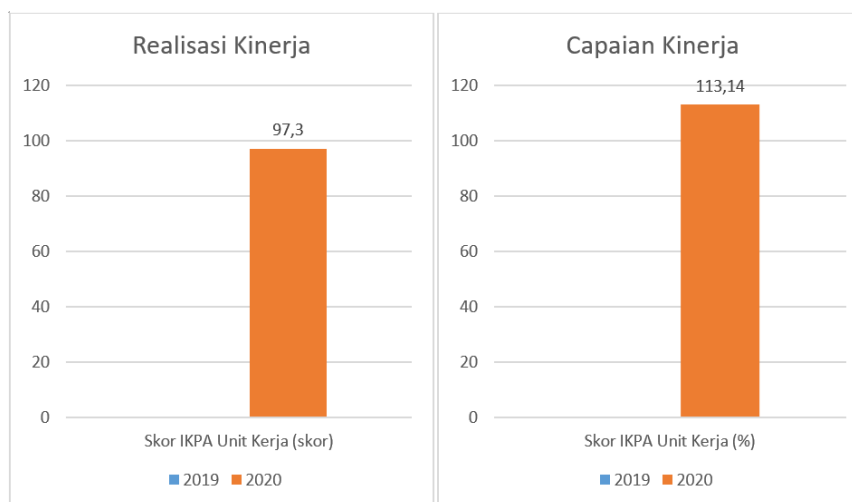
Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)

IKU “Skor IKPA Unit Kerja” di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah dicapai berdasarkan penilaian oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga yang dirilis melalui aplikasi MonevPA dengan nilai sebesar 97,30, lebih besar daripada target Perkin tahun 2020 sebesar 86,00, atau mencapai 113,14% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.34
Perhitungan Penilaian IKPA

No	Indikator	Nilai	Bobot	Total Nilai
1	Revisi DIPA	100	0	0,00
2	Deviasi Halaman III DIPA	99,37	0	0,00
3	Pagu Minus	100	5	5,00
4	Data Kontrak	100	15	15,00
5	Pengelolaan Uang Persediaan (UP)	100	8	8,00
6	Penyampaian LPJ Bendahara	83,00	5	4,15
7	Dispensasi SPM	100	5	5,00
8	Penyerapan Anggaran	100	15	15,00
9	Penyelesaian Tagihan	100	12	12,00
10	Konfirmasi Capaian Output	96,30	10	9,63
11	Retur SP2D	100	5	5,00
12	Renkas	0	0	0,00
13	Pengembalian/Kesalahan SPM	85	5	4,25
Total Nilai				71,03
Konversi Bobot				73%
Nilai Akhir				97,30

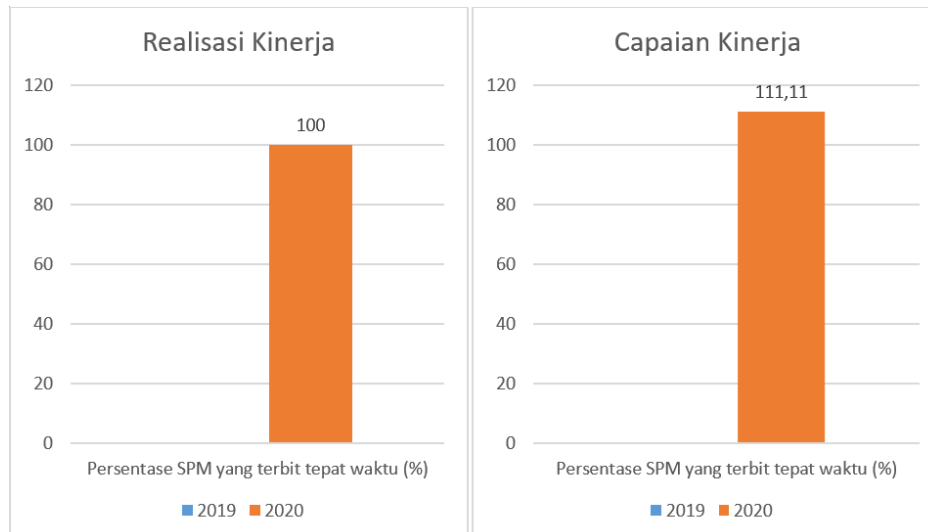
Gambar 3.23
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Skor IKPA Unit Kerja



6.6.***Persentase SPM yang terbit tepat waktu***

IKU “Persentase SPM yang terbit tepat waktu” di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah dicapai dengan dilaksanakannya penilaian penyelesaian tagihan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dengan persentase sebesar 100 persen, lebih besar dibandingkan dengan target Perkin tahun 2020 sebesar 90 persen. Penilaian dilakukan dengan membandingkan antara rasio penyelesaian tagihan tepat waktu dibandingkan dengan seluruh tagihan. Selama tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mengajukan 7 SPM kontraktual dan seluruhnya terbit tepat waktu.

Gambar 3.24
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase SPM yang terbit tepat waktu

**6.7.*****Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)***

IKU “Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP” di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah dicapai dengan

dilaksanakannya rekonsiliasi internal dengan Biro Keuangan dan Inspektorat atas Laporan Keuangan Tahun 2019, Laporan Semesteran Tahun 2020 dan Laporan Triwulan III Tahun 2020 serta rekonsiliasi eksternal bulanan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui aplikasi E-Rekon LK dengan persentase sebesar 100 persen sama dibandingkan dengan target Perkin tahun 2020 sebesar 100 persen.

Gambar 3.25
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

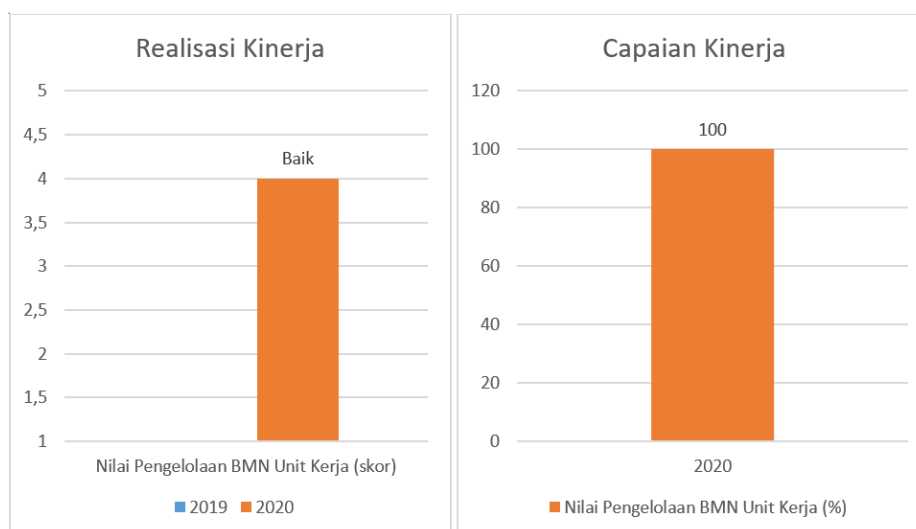


6.8.

Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)

IKU “Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja” di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah dicapai dengan nilai sebesar 100 (realisasi BM, updating SIMAK BMN dan Persediaan, Laporan Bulanan BMN, Laporan Semesteran BMN, labelisasi BMN dan updating DBR/DIR) sama dengan target Perkin tahun 2020 sebesar 100.

Gambar 3.26
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja



6.9. Nilai SAKIP Unit Kerja

IKU “Nilai SAKIP Unit Kerja” di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan organisasi dan untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), BPKP sebagai lembaga pemerintah berkewajiban untuk mengimplementasikan SAKIP yang efektif.

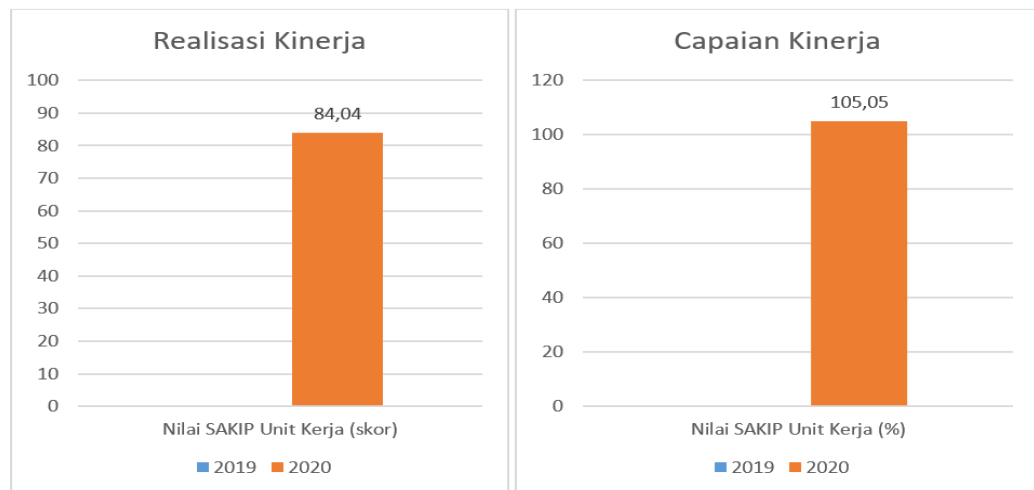
Indikator yang mencerminkan nilai kinerja dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi Nilai SAKIP Unit Kerja} = \frac{\text{Nilai SAKIP Unit Kerja}}{\text{Target Nilai SAKIP Unit Kerja}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Nilai SAKIP Unit Kerja” tahun 2020 adalah sebesar 105,05% atau melebihi target sebesar 100% dengan skor Nilai SAKIP Unit Kerja sebesar 84,04 berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat BPKP.

Analisis capaian IKU “Nilai SAKIP Unit Kerja” sampai dengan tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo 2020 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2019 karena pada tahun 2019 belum ada target capaian IKU “Nilai SAKIP Unit Kerja”.

Gambar 3.27
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Unit Kerja



6.10. *Maturitas SPIP Unit Kerja*

IKU “Maturitas SPIP Unit Kerja” di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan organisasi dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan BPKP untuk melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Disamping tugas untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP, BPKP sebagai lembaga pemerintah juga berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan SPIP yang efektif.

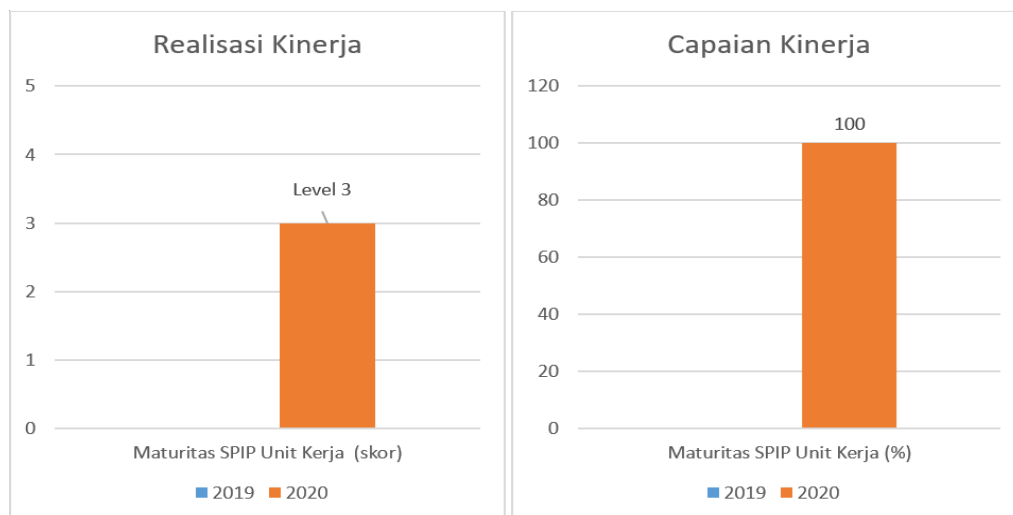
Indikator yang mencerminkan nilai kinerja dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Realisasi IKU Maturitas SPIP Unit Kerja Level 3} = \frac{\text{Maturitas SPIP Unit Kerja Level 3}}{\text{Target Maturitas SPIP Unit Kerja Level 3}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Maturitas SPIP Unit Kerja” tahun 2020 adalah sebesar 100% atau mencapai target sebesar 100%, yaitu skor Maturitas SPIP Unit Kerja sebesar 3,819 berdasarkan hasil *Self Assesment* Tahun 2018 dan Evaluasi Inspektorat BPKP.

Analisis capaian IKU “Maturitas SPIP Unit Kerja” sampai dengan tahun 2020 Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo 2020 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2019 karena pada tahun 2019 belum ada target capaian IKU “Maturitas SPIP Unit Kerja”.

Gambar 3.28
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Maturitas SPIP Unit Kerja

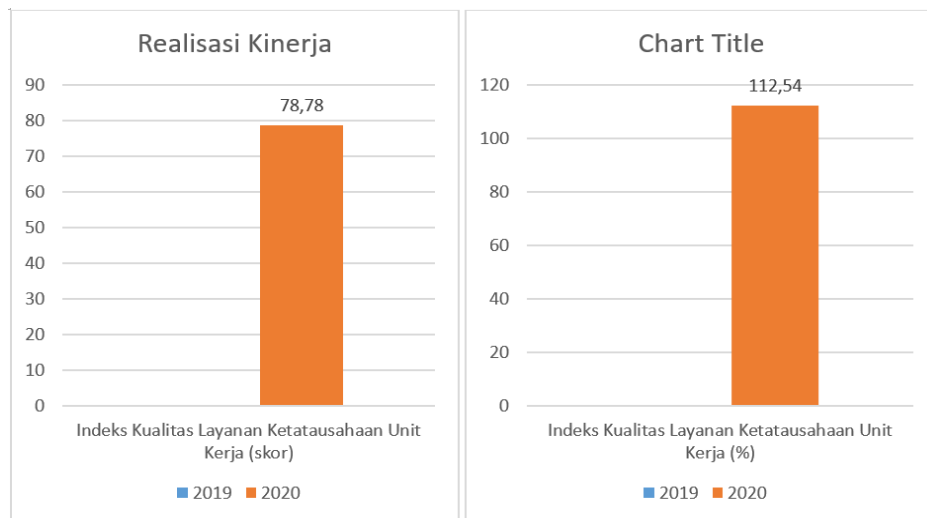


6.12. **Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja**

Realisasi IKU “Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja” adalah sebesar 78,78. Hal ini merupakan hasil dari pengisian kuisioner kepuasan pelayanan Tata Usaha yang diisi oleh seluruh pegawai Kantor

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, lebih tinggi dari nilai yang ditargetkan dalam Perkin tahun 2020 sebesar 70, atau tercapai 112,54%

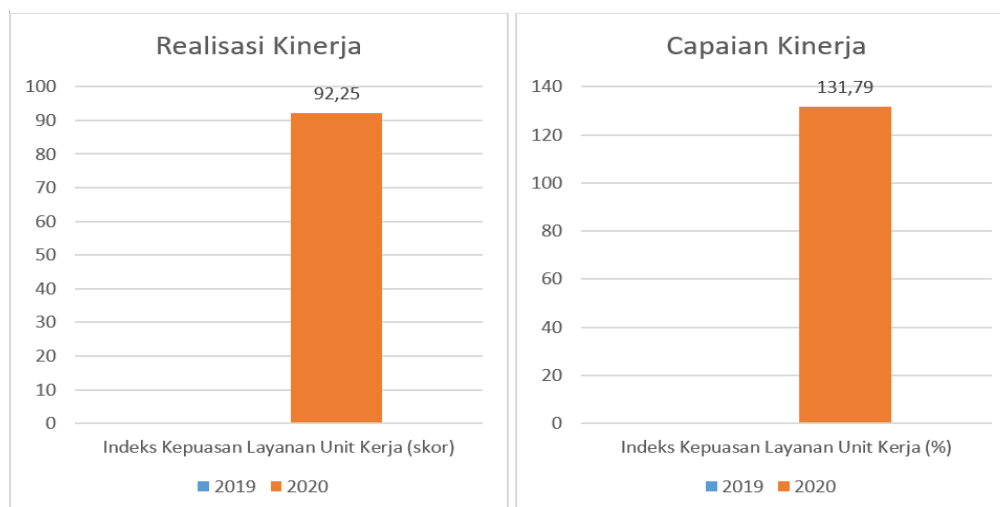
Gambar 3.29
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Layanan
Ketatausahaan Unit Kerja



6.13. *Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)*

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Penilaian Mandiri Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja sesuai Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor S-1555/PW31/1/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Penilaian Mandiri Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan nilai sebesar 87,48 dan telah dievaluasi oleh Inspektorat BPKP dengan nilai 92,25 sesuai Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK pada Perwakilan BPKP Gorontalo Tahun 2020 Nomor LEV-072/IN/2020 tanggal 13 Juli 2020, lebih besar daripada target Perkin tahun 2020 sebesar 70,00.

Gambar 3.30
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja



B. KINERJA LAINNYA TAHUN 2020

1. Kinerja Lainnya

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2020 belum melaksanakan inovasi yang dapat dikategorikan ke dalam kinerja lain.

2. Penghargaan

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2020 belum memperoleh penghargaan yang bisa dikategorikan sebagai kinerja yang dapat dilaporkan.

3. Perbaikan SAKIP tahun 2020

Dalam implementasi SAKIP pada tahun 2020, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo mengalami perbaikan ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP. Pada tahun 2020, atas implementasi SAKIP tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo memperoleh nilai sebesar 84,04 (Kategori 'A') dengan interpretasi 'Memuaskan', nilai tersebut meningkat jika dibandingkan dengan hasil pada tahun 2019, atas implementasi SAKIP tahun 2018, yang memperoleh nilai sebesar 82,59 (Kategori 'A') dengan interpretasi 'Memuaskan'. Peningkatan nilai atas implementasi SAKIP pada Perwakilan

BPKP Provinsi Gorontalo terdapat pada aspek Perencanaan dan Pelaporan Kinerja, sedangkan pada aspek Pengukuran Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Adapun rincian perbaikan nilai implementasi SAKIP pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo disajikan pada table berikut:

Tabel 3.35
Perbaikan Nilai Implementasi SAKIP tahun 2020

No	Komponen	Bobot	Capaian 2018	Nilai 2018	Capaian 2019	Nilai 2019
1	Perencanaan Kinerja	30%	86,95%	26,09	92,58%	27,78
2	Pengukuran Kinerja	25%	90,00%	22,50	88,75%	22,19
3	Pelaporan Kinerja	15%	86,86%	13,03	88,64%	13,30
4	Evaluasi Internal	10%	67,08%	6,71	65,83%	6,58
5	Capaian Kinerja	20%	71,32%	14,26	70,96%	14,19
Nilai Hasil Evaluasi		100%	82,59%	82,59	84,04%	84,04
Tingkat Akuntabilitas Kinerja				A		A

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar Rp19.083.459.622,00 atau terserap 98,66% dibandingkan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp18.693.666.646,00. Rincian per jenis belanja dan per program dapat dilihat pada Tabel 3.35, 3.36 dan 3.37

Tabel 3.36
Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Tahun 2020 menurut Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	12.566.800.000,00	12.380.977.514,00	98,52
2	Belanja Barang	5.717.674.000,00	5.649.802.558,00	98,81
3	Belanja Modal	1.058.674.000,00	1.052.679.550,00	99,43
	Jumlah	19.343.148.000,00	19.083.459.622,00	98,66

Tabel 3.37
 Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
 Tahun 2020 menurut Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP			
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	821.874.000	818.013.550	99,53
2	Layanan Manajemen Organisasi	331.900.000	329.716.104	99,34
3	Layanan Perkantoran	15.395.805.000	15.180.700.979	98,60
	Jumlah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	16.549.579.000	16.328.430.633	98,66
II	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas keuangan Negara			
1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Penugasan Presiden di Perwakilan BPKP	85.125.000	83.597.000	98,20
2	Rekomendasi Hasil Pengawasan Program Prioritas/Bidang Pembangunan di Perwakilan BPKP	319.446.000	317.447.186	99,37
3	Rekomendasi hasil pembinaan SPIP dan manajemen risiko	103.299.000	103.111.799	99,82
4	Rekomendasi hasil pembinaan APIP Pemda	212.909.000	212.175.380	99,66
5	Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	354.400.000	353.167.751	99,65
6	Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	1.718.390.000	1.685.529.873	98,09
	Jumlah Program Pengawasan Intern Akuntabilitas keuangan Negara	2.793.569.000	2.755.028.989	98,62
	Jumlah Total	19.343.148.000	19.083.459.622	98,66

Tabel 3.38
 Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
 Tahun 2020 menurut Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah	1.314.698.000,00	1.290.719.373,00	98,18
2	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	319.446.000,00	317.447.186,00	99,37
3	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	161.810.000,00	153.829.500,00	95,07
4	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	327.007.000,00	324.578.000,00	99,26
5	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	670.608.000,00	668.454.930,00	99,68
6	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	16.549.579.000,00	16.328.430.633,00	98,66
	Jumlah	19.343.148.000,00	19.083.459.622,00	98,66

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo dalam mencapai sasaran program dan IKU tahun 2020, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Dari uraian capaian kinerja pada Bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa atas 30 (tiga puluh) IKU yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, masih terdapat 2 (dua) IKU yang belum tercapai yaitu Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat dan Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Capaian Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	IKU	Capaian IKU (%)	Ket
1	Sasaran Strategis 1	IKU 1.1	190,52%	Tercapai
		IKU 1.2	131,45%	Tercapai
		IKU 1.4	230,05%	Tercapai
2	Sasaran Strategis 2	IKU 2.1	157,14%	Tercapai
		IKU 2.2	157,14%	Tercapai
		IKU 2.5	100,00%	Tercapai
3	Sasaran Strategis 3	IKU 3.2	50,00%	Tidak Tercapai
		IKU 3.3	200,00 %	Tercapai
		IKU 3.4	100,00%	Tercapai
4	Sasaran Strategis 4	IKU 4.1	100,00%	Tercapai
		IKU 4.2	100,00%	Tercapai
5	Sasaran Strategis 5	IKU 5.1	153,85%	Tercapai
		IKU 5.2	100,00%	Tercapai
		IKU 5.4	0	Tidak Tercapai
		IKU 5.5	700,00%	Tercapai

		IKU 5.6	100,00%	Tercapai
		IKU 5.7	249,81%	Tercapai
		IKU 5.9	100,00%	Tercapai
6	Sasaran Strategis 6	IKU 6.1	109,43%	Tercapai
		IKU 6.2	100,00%	Tercapai
		IKU 6.3	100,00%	Tercapai
		IKU 6.4	100,00%	Tercapai
		IKU 6.5	113,14%	Tercapai
		IKU 6.6	111,11%	Tercapai
		IKU 6.7	100,00%	Tercapai
		IKU 6.8	100,00%	Tercapai
		IKU 6.9	105,05%	Tercapai
		IKU 6.10	100,00%	Tercapai
		IKU 6.12	112,54%	Tercapai
		IKU 6.13	131,79%	Tercapai

Uraian ringkas hasil pengukuran dari delapan IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. IKU “Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi”
Realisasi IKU “Persentase penerimaan negara/daerah yang terealisasi” tahun 2020 adalah sebesar Rp221.000.000,00 atau tercapai 190,52% dari target sebesar Rp116.000.000,00.
2. IKU “Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi”
Realisasi IKU “Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi” tahun 2020 adalah sebesar Rp304.000.000,00 atau tercapai 131,45% dari target sebesar Rp231.000.000,00.
3. IKU “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara”
Realisasi Nilai Penyelamatan Keuangan Negara adalah Rp62.400.000.000,00 atau tercapai 230,05% dari target tahun 2020 sebesar Rp27.124.000.000,00.
4. IKU “Jumlah KP yang diawasi”

Realisasi IKU “Jumlah KP Yang Diawasi” tahun 2020 adalah sebesar 11 (sebelas) kegiatan atau tercapai 157,14% dari target sebesar 7 (tujuh) kegiatan.

5. IKU “Jumlah KP yang tercapai sesuai target”

Realisasi IKU “Jumlah KP Yang Tercapai Sesuai Target” tahun 2020 adalah sebesar 11 (sebelas) kegiatan atau tercapai 157,14% dari target sebesar 7 (tujuh) kegiatan.

6. IKU “Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan”

Realisasi IKU “Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan” tahun 2020 adalah sebesar 75% atau tercapai 100% dari target sebesar 75%, dengan perhitungan satu Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak pada tahun 2020 dibandingkan dengan satu Laporan EHKP pada tahun 2020.

7. IKU “Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat”

Realisasi IKU “BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi” tahun 2020 atas kinerja BUMD tahun 2019 adalah sebesar 1 BUMD atau tercapai 50,00% dari target sebanyak 2 BUMD.

8. IKU “BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi”

Realisasi IKU “BLUD yang tata kelolanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi” adalah sebanyak 2 BLUD atau tercapai 200,00% dari target sebanyak 1 BLUD. Jumlah BLUD di Provinsi Gorontalo sebanyak 5 BLUD dan sampai dengan tahun 2020 telah dilakukan evaluasi sebanyak 3 BLUD.

9. IKU “BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan”

Realisasi IKU “BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan” tahun 2020 adalah sebanyak 14 BUMDes atau 100,00% dari yang ditarget sebanyak 14 BUMDes. Jumlah BUMDes yang ada di Provinsi Gorontalo sebanyak 646 BUMDes yang tersebar di 5 Kabupaten.

10. IKK “Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan”

Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan” tahun 2020 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan sebanyak 4 Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI), 3 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN), dan 2 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (LHATT) yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan pada tahun 2020 dibandingkan dengan 4 LHAI, 3 LHAPKKN, dan 2 LHATT yang diterbitkan pada tahun 2020.

11. IKU “Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan”

Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan” tahun 2020 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan sebanyak 1 Laporan *Fraud Risk Assessment* (FRA), 2 Laporan *Fraud Control Plan* (FCP), 1 Laporan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dan 2 Laporan Sosialisasi Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh *stakeholders* pada tahun 2020 dibandingkan dengan 1 Laporan FRA, 2 Laporan FCP, 1 Laporan MPAK, dan 2 Laporan IEPK yang terbit pada tahun 2020.

12. IKU “Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3”

Realisasi IKU “Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” tahun 2020 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan tujuh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan kapabilitas minimal level 3 APIP dibandingkan dengan tujuh APIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

13. IKU “Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3”

Realisasi IKU “Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” tahun 2020 adalah sebesar 100% atau mencapai 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan 7 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

dengan maturitas SPIP minimal level 3 dibandingkan dengan 7 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

14. IKU “Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3”

Realisasi IKU “Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3” tahun 2020 adalah sebesar 0% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan tidak terdapat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan MRI minimal Level 3 dibandingkan dengan satu Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi target IKU tahun 2020. Hal ini disebabkan karena Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo baru melakukan Penyusunan *Baseline* Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

15. IKU “Presentase Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja”

Realisasi IKU “Jumlah Pemda Yang Akuntabel Pengelolaan Keuangan dan Kinerja” tahun 2020 adalah sebesar 100% atau tercapai 700% dari target sebesar 14,29%. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 untuk seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo telah mendapat WTP dan Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 untuk semua Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo sudah mendapat nilai “B” dan “BB”.

16. IKU “Tersedianya rekomendasi strategis prov/kab/kota”

Realisasi IKU “Tersedianya rekomendasi strategis prov/kab/kota” tahun 2020 adalah sebesar 100% atau mencapai 100% dari target sebesar 1 Rekomendasi ke Prov/Kab/Kota. Rekomendasi diberikan dalam bentuk atensi dengan nomor surat S-1147/PW31/3/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo merupakan bentuk dari tanggapan atas rencana pengadaan 50 kendaraan roda dua sebagai salah satu tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah

Daerah. Namun pengadaan tersebut menyalahi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

17. IKU “Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa”
Realisasi IKU “Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa” tahun 2020 adalah sebesar 100% atau mencapai 249,81% dari target sebesar 40,03%, dengan perhitungan 657 Pemerintah Desa yang telah menyusun LPJ Keuangan desa dibandingkan dengan 263 Pemerintah Desa yang menjadi target dalam IKU “Persentase Jumlah Desa yang Menyusun LPJ Keuangan Desa” tahun 2020.
18. IKU “Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes”
Realisasi IKU “Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes” tahun 2020 adalah sebesar 100% atau mencapai 100% dari target sebesar 100%, dengan perhitungan 1 APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Siswaskeudes dibandingkan dengan 1 APIP Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi target IKU Tahun 2020.
19. IKU “Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja”
Realisasi IKU “Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja” sebesar 82,07. Hal tersebut sesuai Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK pada Perwakilan BPKP Gorontalo Tahun 2020 Nomor LEV-072/IN/2020 tanggal 13 Juli 2020, lebih besar daripada target Perkin tahun 2020 sebesar 75,00.
20. IKU “Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi”
Realisasi IKU “Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi” sebesar 100%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta Diklat berdasarkan penetapan sama dengan Sertifikat Mengikuti Diklat yang diterbitkan, sama dengan target Perkin tahun 2020 sebesar 100%.
21. IKU “Persentase Administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu”
Realisasi IKU “Persentase Administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu” sebesar 100%, sama dengan target Perkin tahun 2020 sebesar 100%.

22. IKU “Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu”

Realisasi IKU “Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu” sebesar 100%, sama dengan target Perkin tahun 2020 sebesar 100%.

23. IKU “Skor IKPA Unit Kerja”

Realisasi IKU “Skor IKPA Unit Kerja” adalah 97,30. Hal ini berdasarkan penilaian oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga yang dirilis melalui aplikasi MonevPA, lebih besar daripada target Perkin tahun 2020 sebesar 86,00, atau mencapai 113,14%.

24. IKU “Persentase SPM yang terbit tepat waktu”

Realisasi IKU “Persentase SPM yang terbit tepat waktu” sebesar 100%. Hal ini dicapai dengan dilaksanakannya penilaian penyelesaian tagihan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga, lebih besar dibandingkan dengan target Perkin tahun 2020 sebesar 90%, atau dengan capaian sebesar 111,11%.

25. IKU “Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP”

Realisasi IKU “Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP” sebesar 100%. Hal tersebut adalah hasil dilaksanakannya rekonsiliasi internal dengan Biro Keuangan dan Inspektorat atas Laporan Keuangan Tahun 2019, Laporan Semesteran Tahun 2020 dan Laporan Triwulan III Tahun 2020 serta rekonsiliasi eksternal bulanan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui aplikasi E-Rekon LK, sama dengan target Perkin tahun 2020 yaitu sebesar 100 persen.

26. IKU “Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja”

Realisasi IKU “Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja” adalah sebesar 100. Hal ini merupakan hasil realisasi BM, updating SIMAK BMN dan Persediaan, Laporan Bulanan BMN, Laporan Semesteran BMN, labelisasi

BMN dan updating DBR/DIR, sama dengan target Perkin tahun 2020 sebesar 100, atau tercapai 100%.

27. IKU “Nilai SAKIP Unit Kerja”

Realisasi IKU “Nilai SAKIP Unit Kerja” tahun 2020 adalah sebesar 105,05% atau melebihi target sebesar 100% dengan skor Nilai SAKIP Unit Kerja sebesar 84,04 berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat BPKP.

28. IKU “Maturitas SPIP Unit Kerja”

Realisasi IKU “Maturitas SPIP Unit Kerja” tahun 2020 adalah sebesar 100% atau mencapai target sebesar 100%, yaitu skor Maturitas SPIP Unit Kerja sebesar 3,819 berdasarkan hasil *Self Assesment* Tahun 2018 dan Evaluasi Inspektorat BPKP.

29. IKU “Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja”

Realisasi IKU “Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja” adalah sebesar 78,78. Hal ini merupakan hasil dari pengisian kuisisioner kepuasan pelayanan Tata Usaha yang diisi oleh seluruh pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, lebih tinggi dari nilai yang ditargetkan dalam Perkin tahun 2020 sebesar 70, atau tercapai 112,54%.

30. IKU “Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja”

Realisasi IKU “Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja” adalah sebesar 92,25. Hal ini sesuai Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor S-1555/PW31/1/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Penilaian Mandiri Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan nilai sebesar 87,48 dan telah dievaluasi oleh Inspektorat BPKP dengan nilai 92,25 sesuai Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK pada Perwakilan BPKP Gorontalo Tahun 2020 Nomor LEV-072/IN/2020 tanggal 13 Juli 2020, lebih besar daripada target Perkin tahun 2020 sebesar 70,00, atau tercapai 131,79%.

Disadari sepenuhnya bahwa pencapaian sasaran strategis memerlukan upaya dan kerja keras yang berkesinambungan. Langkah-langkah yang direncanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain adalah:

1. Mensosialisasikan perubahan metode perhitungan dalam aplikasi evaluasi PDAM, serta melakukan pembinaan kembali terhadap seluruh PDAM di wilayah Provinsi Gorontalo;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Rencal Kedeputan PPKD terkait pedoman penilaian MRI dan melakukan sosialisasi serta pembinaan terhadap pemerintah daerah atas pedoman penilaian MRI yang telah diterbitkan,
3. Meningkatkan pengembangan kompetensi SDM Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo,
4. Melaksanakan diklat/sosialisasi/workshop pengoperasian Siswaskeudes untuk APIP,
5. Meningkatkan pembinaan terhadap *Area of Improvement* (AOI) untuk optimalisasi meningkatkan Kapabilitas APIP \geq Level 3,
6. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Daerah untuk percepatan internalisasi penyelenggaraan SPIP secara integral dalam kegiatan instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi.

**KINERJA SASARAN PROGRAM DAN PENGGUNAAN DANA/SDM (OH) TAHUN 2020
PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keuangan (Rp000)			SDM (OH)			
							Anggaran (Rp000)	Realisasi (Rp000)	%	Rencana	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ daerah	Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi	juta	116,00	221,00	190,52							
		Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi	juta	231,00	304,00	131,60							
		Nilai penyelamatan keuangan negara	juta	27124,00	62400,00	230,05							
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah KP yang diawasi	buah	7,00	11,00	157,14							
		Jumlah KP yang tercapai sesuai target	buah	7,00	11,00	157,14							
		Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	%	75,00	75,00	100,00							
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat	unit	2,00	1,00	50,00							
		Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat	unit	1,00	2,00	200,00							
		Jumlah BUMDes mampu menyusun LK	unit	14,00	14,00	100,00							
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00							
		Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	%	70,00	70,00	100,00							
5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	unit	7,00	7,00	100,00							
		Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	unit	7,00	7,00	100,00							
		Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	unit	1,00	0,00	0,00							
		Persentase jumlah pemda yg akuntabel pengelolaan keuangan dan kinerja	%	14,29	100,00	699,79							
		Tersedianya rekomendasi strategis prov/kab/kota	Rekomendasi	1,00	1,00	100,00							
		Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa	%	40,03	100,00	249,81							
		Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes	unit	1,00	1,00	100,00							
Sub Jumlah Pengawasan							2.793.569.000	2.755.028.989	98,62%	7.566	7.783	103%	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keuangan (Rp000)			SDM (OH)		
							Anggaran (Rp000)	Realisasi (Rp000)	%	Rencana	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	skor	75,00	82,07	109,43						
		Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	100,00	100,00	100,00						
		Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00						
		Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100,00	100,00	100,00						
		Skor IKPA Unit Kerja	skor	86,00	97,30	113,14						
		Persentase SPM yang terbit tepat waktu	%	90,00	100,00	111,11						
		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	%	100,00	100,00	100,00						
		Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	skor	Baik	Baik	100,00						
		Nilai SAKIP Unit Kerja	skor	80,00	84,04	105,05						
		Maturitas SPIP Unit Kerja	skor	Level 3	Level 3	100,00						
		Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	skor	70,00	78,78	112,54						
		Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	skor	70,00	92,25	131,79						
Sub Jumlah Dukungan Pengawasan							16.549.579.000	16.328.430.633	98,66%	3.081	3.081	100%
JUMLAH							19.343.148.000	19.083.459.622	98,66%	10.647	10.864	102%

**PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN *OUTCOME* TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019 DAN TARGET 2021
PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi		Naik / (Turun)	Capaian		Naik / (Turun)	Realisasi 2020	Target 2024	% realisasi terhadap target 2024
				2019	2020		2019	2020				
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8	11	12	13=11/12*100 %
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/daerah	<i>Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi</i>	juta	n/a*)	221,00	-	n/a*)	190,52	-	221,00	347,00	63,69
		<i>Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi</i>	juta	n/a*)	304,00	-	n/a*)	131,60	-	304,00	578,00	52,60
		<i>Nilai penyelamatan keuangan negara</i>	juta	n/a*)	62400,00	-	n/a*)	230,05	-	62.400,00	51.982,00	120,04
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	<i>Jumlah KP yang diawasi</i>	buah	n/a*)	11,00	-	n/a*)	157,14	-	11,00	7,00	157,14
		<i>Jumlah KP yang tercapai sesuai target</i>	buah	n/a*)	11,00	-	n/a*)	157,14	-	11,00	7,00	157,14
		<i>Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan</i>	%	-	75,00	75,00	0,00	100,00	100,00	75,00	85,00	88,24
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	<i>Jumlah BUMD dengan kinerja Sehat</i>	unit	n/a*)	1,00	-	n/a*)	133,33	-	1,00	5,00	20,00
		<i>Jumlah BLUD dengan kinerja Sehat</i>	unit	n/a*)	2,00	-	n/a*)	50,00	-	2,00	1,00	200,00
		<i>Jumlah BUMDes mampu menyusun LK</i>	unit	n/a*)	14,00	-	n/a*)	100,00	-	14,00	28,00	50,00
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	<i>Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan</i>	%	n/a*)	100,00	-	n/a*)	100,00	-	100,00	100,00	100,00
		<i>Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan</i>	%	n/a*)	70,00	-	n/a*)	100,00	-	70,00	90,00	77,78
5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	<i>Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3</i>	unit	7,00	7,00	-	100,00	100,00	-	7,00	7,00	100,00
		<i>Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3</i>	unit	6,00	7,00	1,00	83,33	100,00	16,67	7,00	7,00	100,00
		<i>Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3</i>	unit	n/a*)	0,00	-	n/a*)	0,00	-	0,00	4,00	-

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi		Naik / (Turun)	Capaian		Naik / (Turun)	Realisasi 2020	Target 2024	% realisasi terhadap target 2024
				2019	2020		2019	2020				
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8	11	12	13=11/12*100 %
		<i>Persentase jumlah pemda yg akuntabel pengelolaan keuangan dan kinerja</i>	%	n/a*)	100,00	-	n/a*)	699,79	-	100,00	111,00	90,09
		<i>Tersedianya rekomendasi strategis prov/kab/kota</i>	Rekomendasi	n/a*)	1,00	-	n/a*)	100,00	-	100,00	100,00	100,00
		<i>Persentase jumlah desa yg menyusun LPJ keuangan desa</i>	%	n/a*)	100,00	-	n/a*)	249,81	-	100,00	59,97	166,75
		<i>Jumlah APIP yg mengimplementasikan Siswaskeudes</i>	unit	n/a*)	1,00	-	n/a*)	100,00	-	1,00	4,00	25,00
6	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	<i>Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja</i>	skor	n/a*)	82,07	-	n/a*)	109,43	-	82,07	79,00	103,89
		<i>Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi</i>	%	n/a*)	100,00	-	n/a*)	100,00	-	100,00	100,00	100,00
		<i>Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu</i>	%	n/a*)	100,00	-	n/a*)	100,00	-	100,00	100,00	100,00
		<i>Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja</i>	%	n/a*)	100,00	-	n/a*)	100,00	-	100,00	100,00	100,00
		<i>Skor IKPA Unit Kerja</i>	skor	n/a*)	97,30	-	n/a*)	113,14	-	97,30	90,00	108,11
		<i>Persentase SPM yang terbit tepat waktu</i>	%	n/a*)	100,00	-	n/a*)	111,11	-	100,00	95,00	105,26
		<i>Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP</i>	%	n/a*)	100,00	-	n/a*)	100,00	-	100,00	100,00	100
		<i>Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)</i>	skor	n/a*)	Baik	-	n/a*)	100,00	-	Baik	Baik	Baik
		<i>Nilai SAKIP Unit Kerja</i>	skor	n/a*)	84,04	-	n/a*)	105,05	-	84,04	84,00	100,047619
		<i>Maturitas SPIP Unit Kerja</i>	skor	n/a*)	Level 3	0	n/a*)	100,00	-	Level 3	Level 4	
		<i>Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja</i>	skor	7,88	78,78	70,90	98,50	112,54	14,04	78,78	82,00	96,07

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi		Naik / (Turun)	Capaian		Naik / (Turun)	Realisasi 2020	Target 2024	% realisasi terhadap target 2024
				2019	2020		2019	2020				
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8	11	12	13=11/12*100 %
		<i>Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja</i>	skor	n/a*)	92,25	-	n/a*)	131,79	-	92,25	81,00	113,89

*) n/a = tidak dapat diperbandingkan karena target yang dimaksud tidak ada pada tahun 2019

**CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/OH (SDM)
PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2020**

Lampiran III/1 - 1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Dana (Rp000)			SDM (OH)			Penggunaan Dana	Penggunaan SDM/OH
							Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Efisien/ Tidak Efisien	Efisien/ Tidak Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Penugasan Presiden Perwakilan BPKP Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden	Laporan	13	15	115,38%	85.125.000	83.597.000	98,20	900	741	82,33	Efisien	Efisien
2	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas	Laporan	23	36	156,52%	319.446.000	317.447.186	99,37	1.905	2.163	113,54	Efisien	Efisien
3	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	Laporan	8	8	100,00%	61.785.000	61.755.000	99,95	315	266	84,44	Efisien	Efisien
4	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Asistensi Manajemen Risiko Perwakilan BPKP Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko	Laporan	4	4	100,00%	41.514.000	41.356.799	99,62	105	27	25,71	Efisien	Efisien
5	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	Laporan	15	15	100,00%	212.909.000	212.175.380	99,66	900	389	43,22	Efisien	Efisien
6	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK di Perwakilan BPKP Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	Laporan	38	51	134,21%	354.400.000	353.167.751	99,65	2.063	1.337	64,81	Efisien	Efisien
7	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Percepatan Penanganan COVID-19 dan PEN	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Percepatan Penanganan COVID-19 dan PEN	Laporan	42	42	100,00%	1.718.390.000	1.685.529.873	98,09	1.378	2.860	207,55	Efisien	Efisien
JUMLAH SASARAN KEGIATAN PENGAWASAN				143	171	119,58042	2.793.569.000	2.755.028.989	98,62	7.566	7.783	102,87		
8	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	100,00	821.874.000	818.013.550	99,53	154	154	100,00	Efisien	Efisien
		Layanan Manajemen Organisasi	Layanan	1	1	100,00	331.900.000	329.716.104	99,34	62	62	100,00	Efisien	Efisien
		Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100,00	15.395.805.000	15.180.700.979	98,60	2.864	2.864	100,00	Efisien	Efisien
JUMLAH SASARAN KEGIATAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA							16.549.579.000	16.328.430.633	98,66	3.081	3.081	100,00		
TOTAL							19.343.148.000	19.083.459.622	98,66	10.647	10.864	102,04		

**PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Realisasi		Naik / (Turun) 7=6-5	Capaian		Naik / (Turun) 10=9-8
				2019	2020		2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=9-8
1	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Penugasan Presiden Perwakilan BPKP Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden	Laporan	33	15	-18	173,68%	115,38%	-58,30%
2	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas	Laporan	79	36	-43	119,70%	156,52%	36,82%
3	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	Laporan	24	8	-16	109,09%	100,00%	-9,09%
4	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Asistensi Manajemen Risiko Perwakilan BPKP Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko	Laporan	n/a*)	4	4	n/a*)	100,00%	100,00%
5	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	Laporan	24	15	-9	100%	100,00%	-
6	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK di Perwakilan BPKP Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	Laporan	n/a*)	51	51	n/a*)	134,21%	134,21%
7	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Percepatan Penanganan COVID-19 dan PEN	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Percepatan Penanganan COVID-19 dan PEN	Laporan	n/a*)	42	42	n/a*)	100,00%	100,00%
8	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	12	12	-	100%	100%	-
		Layanan Manajemen Organisasi	Layanan	n/a*)	1	1,00	n/a*)	100	100,00
		Layanan Perkantoran	Layanan	n/a*)	1	1,00	n/a*)	100	100,00

*) n/a = tidak dapat diperbandingkan karena output yang dimaksud tidak ada pada tahun 2019

MATURITAS SPIP PEMDA TAHUN 2020
PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO

No.	Nama Pemda	Skor	Level	Status Terakhir *)		
				Self Assessment	QA Perwakilan	Reviu Rendal
1	2	3	5	6	7	8
1	Provinsi Gorontalo	3,1250	3			v
2	Kota Gorontalo	3,1057	3			v
3	Kabupaten Boalemo	3,0000	3			v
4	Kabupaten Bone Bolango	3,0000	3			v
5	Kabupaten Gorontalo	3,0830	3			v
6	Kabupaten Gorontalo Utara	3,0000	3		v	
7	Kabupaten Pohuwato	3,0455	3			v

Keterangan : *) untuk status terakhir diisi tanda **V** pada kolom (6, 7 atau 8) yang sesuai dengan status level yang disajikan

KAPABILITAS APIP PEMDA TAHUN 2020
PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO

No.	Nama Pemda	Level	Status Terakhir *)		
			Self Assessment	QA Perwakilan	Reviu Randal
1	2	3	4	5	6
1	Provinsi Gorontalo	3			V
2	Kota Gorontalo	3			V
3	Kabupaten Gorontalo	3			V
4	Kabupaten Boalemo	3			V
5	Kabupaten Bone Bolango	3			V
6	Kabupaten Gorontalo Utara	3			V
7	Kabupaten Pohuwato	3			V

Keterangan : *) untuk status terakhir diisi tanda **V** pada kolom (5, 6 atau 7) yang sesuai dengan status level yang disajikan

TINGKAT KESEHATAN BUMD TAHUN 2020
PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO

No.	Nama PDAM	SKOR	TINGKAT KESEHATAN
1	Kota Gorontalo	2,88	Sehat
2	Kab. Boalemo	2,48	Kurang Sehat
3	Kab. Bone Bolango	2,46	Kurang Sehat
4	Kan. Gorontalo	2,40	Kurang Sehat
5	Kab. Pohuwato	2,04	Sakit
6	Kab. Gorontalo Utara	1,83	Sakit